



UIN ANTASARI BANJARMASIN

Rencana Strategis

2020-2024

DAFTAR ISI

		Hal.
BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Kondisi Umum UIN Antasari.....	5
1.2.1	Kondisi Umum Bidang Pendidikan.....	5
1.2.2	Kondisi Umum Bidang Penelitian.....	7
1.2.3	Kondisi Umum Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	8
1.2.4	Kondisi Umum Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia.....	9
1.2.5	Kondisi Umum Bidang Sarana Prasarana	9
1.3	Potensi dan Permasalahan.....	10
1.3.1	Pemerataan Layanan Pendidikan Islam Berkualitas	10
1.3.2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	12
1.3.3	Memantapkan Pendidikan Agama Islam	15
1.3.4	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam.....	16
1.3.5	Memantapkan Moderasi Beragama.....	16
1.3.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Seluruh Dimensi Pembangunan	17
1.3.7	Kesetaraan Gender.....	19
1.3.8	Analisis SWOT	19
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	34
2.1	Visi	34
2.2	Misi	35
2.3	Tujuan	36
2.4	Sasaran Strategis.....	39
2.5	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	40
2.6	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program.....	42
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA PENGENDALIAN	54
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi	54
3.1.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama...	54
3.1.2	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	57
3.1.3	Arah Kebijakan dan Strategi UIN Antasari	64

3.2	Kerangka Regulasi	71
3.3	Kerangka Kelembagaan.....	72
3.4	Kerangka Pengendalian	73
BAB IV	PENGUKURAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	76
4.1	Pengukuran dan Target Kinerja	76
4.1.1	Pengukuran Target Kinerja.....	68
4.2	Kerangka Pendanaan	85
4.2.1	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	85
4.2.2	Kerangka Pendanaan UIN Antasari	85
BAB V	PENUTUP	90

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional, Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional (RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024), Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024, Rencana Strategis Dirjen Pendidikan Islam 2020-2024, Rencana Strategis UIN Antasari 2015-2019, dan Rencana Induk Pengembangan UIN Antasari 2017-2039. Sesuai dengan Rencana Induk UIN Antasari 2017-2039, Rencana Strategis 2020-2024 ini merupakan Tahap Pengembangan, setelah tiga tahun sebelumnya (2017-2019) telah dilaksanakan tahap fondasi transformasi dari IAIN ke UIN. Pada Tahap Pengembangan ini dilaksanakan pembangunan infrastruktur Kampus II, pembukaan prodi-prodi baru dan fakultas baru. Pada tahap ini pula dilaksanakan pemantapan pelaksanaan empat pilar filosofi keilmuan dalam kegiatan yang berskala nasional dan internasional tingkat Asia Tenggara.

Rencana Strategis ini, selain mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat umum, juga kepada visi UIN Antasari “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berakhlak” dan empat pilar filosofi keilmuan yaitu (1) integrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern; (2) integrasi Islam dan kebangsaan; (3) berbasis lokal; (4) berwawasan global. Selain itu, yang tak kalah penting adalah para pelaku yang berperan dalam mewujudkan cita-cita bersamaini, yang tiada lain adalah sumber daya manusia yang terlibat di UIN Antasari. Para pelaku ini pun tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, karena itu berbagai rencana strategis yang digariskan di sini juga memberikan perhatian padapeningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana secara berkesinambungan.

Rencana Strategis ini juga dibuat dengan penuh kesadaran bahwa semua kegiatan yang direncanakan tidaklah lahir di ruang kosong, melainkan dalam ruang dan waktu tertentu yang memiliki ciri-ciri tertentu, yakni perkembangan masyarakat pada dasawarsa ketiga abad ke-21, yang kini disebut sebagai Era Revolusi Industri Keempat. Para ahli mengatakan bahwa Revolusi Industri Keempat menuntut suatu pendidikan yang terbuka, tidak eksklusif, terkungkung dengan spesialisasi tertentu, melainkan terbuka kepada berbagai disiplin ilmu yang dikenal dengan interdisiplin, multidisiplin hingga trans-disiplin, yang di Indonesia kini disebut dengan istilah ‘kampus merdeka’. Kecenderungan ini ternyata sangat sesuai dengan gagasan tentang integrasi ilmu di UIN Antasari, yang dipahami sebagai takâmul al-‘ulûm, yakni tiap disiplin ilmu dapat memperkaya yang lain, dan karena itu tiap disiplin ilmu sebaiknya saling menyapa dan saling memperkaya. Di sini pula tersirat bahwa orang dan lembaga yang akan berhasil adalah yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Selain itu, tak bisa dihindari bahwa pada era ini, setiap orang harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewaspadaan yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan mudaratnya. Kecakapan lain yang juga amat penting adalah kemampuan berpikir fleksibel, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan bekerjasama.

1.2. Kondisi Umum UIN Antasari

1.2.1. Kondisi Bidang Pendidikan

Analisis aspek Kriteria Pendidikan dilakukan dalam 4 ruang lingkup, yakni kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dengan pembelajaran dan suasana akademik.

Dalam ruang lingkup kurikulum, standar kompetensi lulusan yang dicapai oleh Program Studi di UIN Antasari telah mengacu pada profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran, KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta mendukung tercapainya visi dan misi UIN Antasari. UIN Antasari telah menerapkan kurikulum yang jelas dan terukur tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri.

Setiap program studi di UIN Antasari telah memiliki rumusan SKL tentang kompetensi sikap yang harus dimiliki oleh setiap alumni yang berpedoman pada ketercapaian pembelajaran dalam KKNI, nilai-nilai keislaman, keilmuan, keIndonesiaan dan lokalitas. Lebih dari 75% lulusan mendapatkan penilaian minimal baik dari aspek sikap dan kepribadian.

Kebijakan pengembangan kurikulum juga telah mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan, serta isu-isu strategis seperti pendidikan karakter dan akhlak mulia, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, pendidikan anti kekerasan, kurikulum responsif gender.

Sebagai pengejawantahan visi dan misi UIN Antasari dalam “berakhlak”, pada UIN Antasari telah tersedia pedoman pembelajaran praktek keagamaan dan Ma’had Al Jami’ah. Praktiknya telah dilaksanakan melalui unsur pengajian dan unsur pengkajian dalam proses (1) penanaman nilai-nilai keislaman dalam praktik ibadah dan pandangan hidup; (2) penanaman nilai-nilai Islam moderat yang terintegrasi dengan kebangsaan; (3) pemberian arah dan motivasi bagi mahasiswa untuk mencapai cita-citanya melalui program Goal Setting Training dan Success Story.

Dalam ruang lingkup integrasi penelitian dan PkM dengan pembelajaran UIN Antasari telah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci yang termuat dalam SPMI. Proses pembelajaran ini selalu memuat materi ilmu yang terkini sesuai dengan pengembangan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui hasil penelitian ilmiah, baik dalam bentuk penyempurnaan teori maupun ilustrasi-ilustrasi. Sebagian besar hasil penelitian dimanfaatkan untuk kegiatan PkM. khususnya penelitian dengan pendekatan Research and Development (R&D) dan Participatory Action Research (PAR), baik PkM di dalam maupun luar negeri. Selain itu, temuan-temuan selama kegiatan PkM dapat dijadikan sebagai sumber penetapan persoalan penelitian dan fokus penelitian. SPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran telah tersedia bukti yang sah. .

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup suasana akademik, UIN Antasari telah menjadikannya perhatian utama melalui proses pembelajaran partisipatif, penghargaan terhadap segala pendapat mahasiswa, interaksi akademik kapan dan di mana saja. Sedangkan otonomi keilmuan menjadi perhatian terutama UIN Antasari pada program S3 dengan memperkecil peran pembimbing dalam penulisan tugas akhir (disertasi), yaitu tidak lebih

besar dari 10%. (statuta UIN bab III tentang penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi Bagian kesatu bidang Pendidikan pasal 12)

Terbangunnya suasana akademik, khususnya interaksi antar civitas akademika telah dimonitoring melalui survei online (digital). Kegiatan terkait interaksi antar civitas akademika di bidang akademik maupun non-akademik antara lain: forum akademik, workshop, halal bi halal, jum'at sehat, seminar, buka bersama, perayaan hari besar agama Islam dan religius keagamaan, forum ilmiah, kegiatan menghafal juz 30 pada prodi tertentu, dan kegiatan di ma'had al jami'ah untuk menumbuhkan religious atmosphere.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas dan melihat kondisi umum lainnya, ada beberapa kondisi bidang pendidikan yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Rata-rata IPK lulusan UIN Antasari pada program Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma pada tiga tahun terakhir berada pada rentang 3,38-3,60.
2. Konsep integrasi dan implementasi proses pembelajaran di UIN Antasari belum maksimal, khususnya dalam bidang sains.
3. Belum maksimalnya integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
4. Kurangnya pembinaan terhadap mahasiswa dalam perolehan prestasi akademik maupun non akademik Ketika mereka akan bersaing mengikuti perlombaan di tingkat nasional maupun internasional.
5. Program doktor dan magister masih belum optimal dalam memenuhi standar lama studi
6. Saat ini belum ditemukan lulusan yang bekerja di tingkat internasional.

1.2.2 Kondisi Bidang Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang sangat strategis dalam ikhtiar pengembangan keilmuan di lingkungan UIN Antasari. Sebagai satu-satunya Universitas Islam Negeri yang ada di pulau Kalimantan, ada harapan besar dari masyarakat bahwa keberadaan UIN Antasari menjadi pusat kajian keislaman yang menjadi rujukan masyarakat luas yang ingin memahami tentang seluk beluk Islam Kalimantan secara khusus. Perhatian pada isu-isu lokal sebagai bagian yang dari tema besar penelitian di UIN Antasari, menjadikan kajian-kajian seputar tema ini akan terus semakin kaya dan menambah khazanah kebudayaan Islam lokal yang masih terbatas jumlahnya. Publikasi buku-buku hasil penelitian Islam lokal seperti Al Qur'an berbahasa Banjar, Islam dan Masyarakat Banjar, ulama banjar dari masa ke masa, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjadi indikator penting dari maraknya kajian Islam dan kebudayaan Banjar yang dilakukan.

Perhatian dan minat terhadap penelitian di lingkungan UIN Antasari juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir lebih dari 900 buah penelitian dihasilkan oleh sivitas akademika di lingkungan UIN Antasari. Sebagiannya dilakukan secara mandiri, mengingat tidak semua anggaran penelitian yang disiapkan oleh LP2M dapat mendanai semua kerja penelitian para dosennya.

Secara kelembagaan, pemberian semangat kepada para dosen untuk melakukan penelitian dilakukan dengan pemberian insentif kepada para dosen yang menulis di jurnal akreditasi sinta 2 dan jurnal internasional. Harapannya pemberian insentif ini akan terus berkesinambungan dan dapat dianggarkan, sehingga publikasi dosen di jurnal akreditasi sinta 2 dan internasional akan semakin bertambah.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas dan melihat kondisi umum lainnya, ada beberapa kondisi bidang penelitian yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Secara nasional produktivitas penelitian dosen sudah masuk ke dalam kategori baik, karena memiliki lebih dari 900 penelitian dalam 3 tahun terakhir.
2. Minimnya jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dari luar negeri disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi Kerjasama dengan Lembaga-lembaga luar negeri.
3. Publikasi karya ilmiah UIN Antasari berada pada kategori baik. Hanya saja publikasi jurnal nasional lebih dominan dibandingkan dengan jurnal internasional, apalagi jurnal internasional bereputasi sangatlah sedikit. Hal ini karena penelitian yang dilakukan dosen lebih banyak berorientasi pada masalah-masalah local.
4. Meskipun UIN Antasari telah mencapai kategori sangat baik dalam sitasi publikasi ilmiah, namun publikasi yang disitasi belum banyak dikutip oleh peneliti maupun akademisi dari Lembaga luar negeri/internasional. Hal ini karena jumlah tulisan publikasi ilmiah dosen UIN Antasari lebih banyak ditulis dalam Bahasa Indonesia.
5. Belum maksimalnya integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
6. Minimnya sumber dana penelitian luar negeri.

1.2.3 Kondisi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terdokumentasikan dengan sangat baik dalam bentuk laporan pengabdian. Laporan PkM tersebut belum seluruhnya dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional. Hasil PkM yang berlokasi di daerah 3T (tertinggal, terdalam, dan terluar Evaluasi) juga diselenggarakan pada setiap tahun. Selain itu, LP2M memberikan penghargaan berupa SK pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

Dalam aspek kriteria Pengabdian kepada Masyarakat diketahui bahwa mahasiswa dan dosen UIN Antasari dalam pelaksanaan PkM selalu merujuk pada Renstra PkM, Pedoman PkM, bukti sah tentang pelaksanaan PkM, pedoman Pengabdian Dosen, dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa. Hasil penelitian dan dalam bidang teknologi tepat guna yang dilakukan oleh prodi dan mahasiswa UIN Antasari telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terdokumentasikan dengan sangat baik dalam bentuk laporan pengabdian. Laporan PkM tersebut belum seluruhnya dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional. Evaluasi PkM selalu diselenggarakan setiap tahun, untuk melihat hasil pkm yang berlokasi di daerah 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar. Selain itu, LP2M memberikan penghargaan berupa SK pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas dan melihat kondisi umum lainnya, ada beberapa kondisi bidang pengabdian kepada masyarakat yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Seluruh pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terdokumentasikan dengan sangat baik dalam bentuk laporan pengabdian sejumlah 1517, walaupun belum seluruhnya dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.
2. Hasil PkM yang berlokasi di daerah 3T (tertinggal, terdalam, dan terluar evaluasi)

rutin diselenggarakan setiap tahun. Selain itu LP2M memberikan penghargaan berupa SK pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

3. Minimnya sumber dana PkM luar negeri

1.2.4 Kondisi Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Dari hasil evaluasi terhadap tata pamong dan tata kelola dalam hal sistem tata pamong dan tata kelola, UIN Antasari telah menjalankan sistem kelembagaan ini berdasarkan standar yang berlaku dan berpedoman pada dokumen resmi universitas dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Meskipun sebagian dokumen belum diratifikasi menjadi kebijakan internal yang disahkan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan senat maupun dewan penyantun. Organ utama maupun organ pendukung akademik dan manajemen di bawah rektor melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada statuta, meskipun masih terdapat beberapa organ yang belum menjalankan fungsinya secara maksimal sehingga berimplikasi pada penjaminan mutu perguruan tinggi.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan di atas dan melihat kondisi umum lainnya, ada beberapa kondisi bidang tata Kelola dan sumberdaya manusia yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Prestasi akademik; Akreditasi institusi B dengan 1 prodi terakreditasi A dan 28 prodi terakreditasi B dan 8 prodi terakreditasi C
2. Prestasi non akademik, meraih predikat WBK
3. Belum maksimalnya pengelolaan tata kelola basis manajemen mutu terpadu dan mitigasi risiko
4. Dosen UIN Antasari dengan kualifikasi guru besar sebesar 3,8%. Ini merupakan pencapaian indikator kinerja utama yang masih rendah dari SN-Dikti.
5. Jumlah dosen yang bersertifikasi masih perlu ditingkatkan.
6. Kesadaran yang kurang dari civitas akademika terkait capaian dan luaran tridharma perguruan tinggi berbasis SPMI.

1.2.5 Kondisi Bidang Sarana Prasarana

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sarana dan prasarana, maka ada beberapa hal yang telah dikembangkan UIN Antasari dalam mewujudkan kelancaran aktivitas organisasi kegiatan akademik maupun non akademik, yaitu: (1) UIN Antasari telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses belajar-mengajar, penelitian dan PkM dengan baik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat dan meningkatnya kinerja dosen dan tenaga kependidikan, menuntut penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ruang kuliah, media pembelajaran, serta hal lain yang dapat mendukung proses pembelajaran, penelitian dan PkM; (2) UIN Antasari telah melakukan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dalam layanan akademik yaitu, sistem informasi akademik, perpustakaan digital, e-learning, jurnal online, dan sistem informasi lain yang mendukung proses pembelajaran.

Dengan hal yang telah tersebut dan melihat kondisi umum lainnya, ada beberapa kondisi bidang kelembagaan dan sarana prasarana yang perlu digaris bawahi, yaitu:

1. Seiring dengan perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat dan meningkatnya kinerja dosen dan tenaga kependidikan, menuntut penambahan serta

pemeliharaan sarana dan prasarana ruang kuliah, media pembelajaran, serta hal lain yang dapat mendukung proses pembelajaran, penelitian dan PkM.

2. Program yang belum berhasil dilaksanakan; 1) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan baik dalam pembelajaran, penelitian dan PkM belum memadai; 2) Laboratorium pembelajaran penelitian dan PkM belum memadai; 3) Sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus belum memadai; 4) Akses jaringan internet belum maksimal.
3. Masalah utama yang menghambat program adalah belum maksimalnya pengelolaan dana untuk sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan PkM, termasuk sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan TIK.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Pemerataan Layanan Pendidikan Islam Berkualitas

Tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia secara nasional terkait dengan akses pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah (ATS), dan masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang baru mencapai 29,93 persen. Salah satu penyebab terjadinya ATS adalah rendahnya tingkat kesiapan belajar (readiness to learn) di sekolah dan sulitnya memperoleh akses ke lembaga pendidikan, karena mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau karena bermukim di daerah 3T.

Gambar Capaian Peningkatan Akses Bidang Pendidikan



Sumber: EMIS, 2016/2017; 2017/2018, Direktorat PAI, 2018; Puspendik Kemendikbud, 2018;

Grafik di atas menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi besar terhadap APK nasional, kecuali di MI/Ula, dan jenjang perguruan tinggi. Kontribusi APK Pendidikan Islam pada PTKI juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam rentang waktu antara tahun 2015 – 2019 jumlah lembaga PTKI mengalami peningkatan yang moderat, dari 693 menjadi 796 dengan rerata 25 lembaga baru setiap tahun.

Peningkatan jumlah lembaga ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga pada tahun 2019 menjadi 975.771 mahasiswa. Moderatnya pertumbuhan APK PTKI disebabkan karena: (a) rendahnya daya beli masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi; (b) meningkatnya jumlah mahasiswa yang sebagian besar melalui insititusi baru berupa STKI yang terbatas jumlah program studi dan kapasitasnya; dan (c) tidak meratanya lokasi perguruan tinggi Islam di daerah.

Kurang optimalnya mutu layanan, sarana dan prasarana serta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berakibat kepada capaian akreditasi. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian akreditasi adalah persoalan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Walaupun SPM sudah ditetapkan untuk semua jenis Pendidikan Islam (madrasah, muadalah, PTKI, dan Pesantren), namun sebagian besar belum dapat terpenuhi, terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.

1.3.2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Berdasarkan indeks kompetisi global (Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia menempati urutan ke 36 dari 137 negara pada tahun 2017. Selain itu, dari pertumbuhan PDB 4,9 persen (2017), sebesar 0,6 persen bersumber dari total factory productivity (TFP), dan 2,8 persen dari modal kapital, serta 1,5 persen dari modal manusia.⁴ Untuk mempersiapkan daya saing bangsa dalam era persaingan global, maka perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting.

Secara nasional, posisi PTKI sangat strategis karena tiga hal Pertama, perguruan tinggi memiliki nilai investasi yang baik, karena pekerja dengan ijazah perguruan tinggi memperoleh penghasilan kerja rata-rata 75 persen lebih tinggi dari yang berijazah sekolah menengah atas dan 130 persen lebih tinggi dari yang berijazah sekolah menengah pertama (Sakernas, 2016). Kedua, lulusan perguruan tinggi mempunyai resiko rendah untuk menjadi penganggur terbuka (situs web BPS, 2019). Ketiga, hasil analisis Sakernas 2017 menunjukkan bahwa serapan hasil lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di dunia kerja lebih baik dari lulusan perguruan tinggi umum, baik sebagai karyawan maupun wirausaha. Sampai saat ini, PTKI mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya PTKI swasta. Jumlah total PTKI mencapai 796.

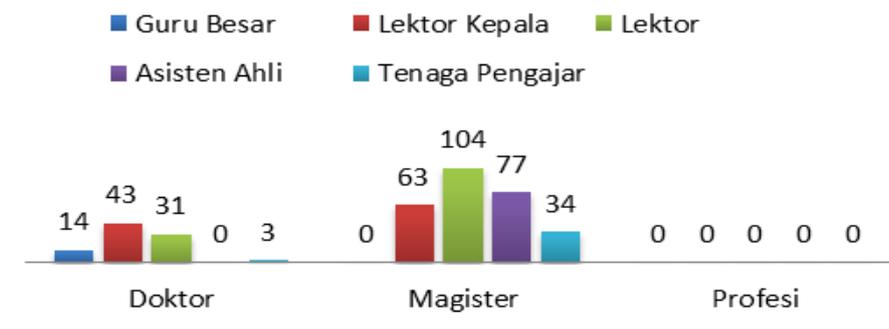
Di samping itu, Ma'had Aly sebagai bagian dari sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan, juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sampai saat ini terdapat 35 lembaga dengan terdiri 210 program studi dan memiliki 1.572 mahasantri. Sejauh ini standarisasi pendidikan yang terkait dengan Ma'had Aly belum dilakukan sehingga belum dapat memenuhi standar nasional. Begitu pula kesetaraan kualifikasi dosennya belum berhasil dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 2015 - 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berupaya meningkatkan proporsi kualifikasi dosen yang berpendidikan S2 dan S3. Salah satunya melalui program "5.000 doktor". Sehingga sampai saat ini jumlah dosen yang berpendidikan S2 mencapai 94,96 persen (melebihi 0,67 persesn dari target yang ditetapkan), dan dosen yang berpendidikan S3 mencapai 12,29 persen (melebihi 0,68 persen dari target yang ditetapkan).

Terkait dengan hal ini, dosen UIN Antasari dengan kualifikasi guru besar sebesar

3.8%. Ini menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama masih rendah dari SN Dikti. Idealnya dosen dengan kualifikasi guru berjumlah 9 %. Untuk mencapai jumlah 9 % dosen dengan kualifikasi guru besar, UIN Antasari telah melakukan berbagai program sebagai aksi afirmasi, di antaranya workshop penulisan artikel jurnal internasional bereputasi bagi seluruh dosen dan pendampingan/coaching menjadi guru besar bagi lektor kepala.

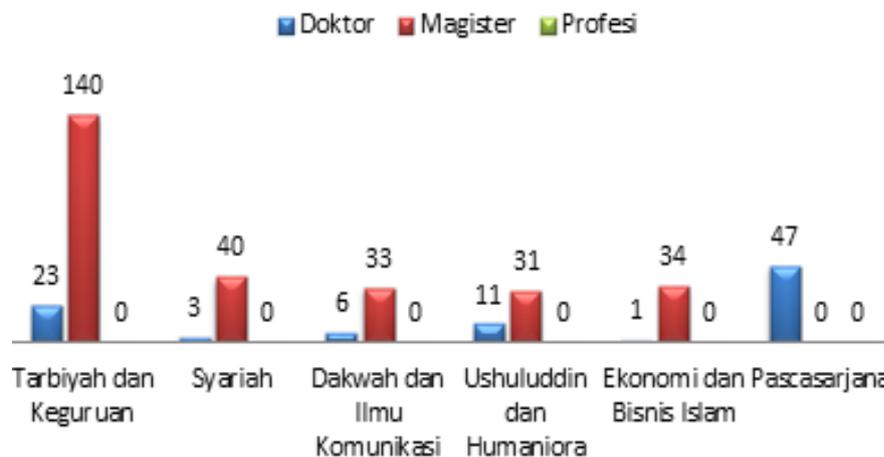
Data Dosen Tetap berdasarkan Jabatan Akademik



Dari 369 Dosen UIN Antasari, ada 91 orang (24.66%) dosen telah berkualifikasi S3, dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikat profesi mencapai 257 orang (69,65%). Jumlah dosen yang bersertifikasi masih perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan sertifikasi. Pencapaian kinerja lainnya adalah bahwa seluruh dosen yang mengampu mata kuliah telah sesuai dengan kompetensi program studi dan keilmuan dosen yang bersangkutan.

Pencapaian target 40 % jumlah dosen berkualifikasi S3 pada 2021, telah dilakukan upaya melalui studi lanjut dalam dan luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program MORA 5000 Doktor dan Kerjasama lembaga luar PT, seperti Beasiswa Maming sebesar 10 orang untuk program doktor. Rangkaian data tersebut dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

Data Dosen Tetap berdasarkan Pendidikan Tertinggi



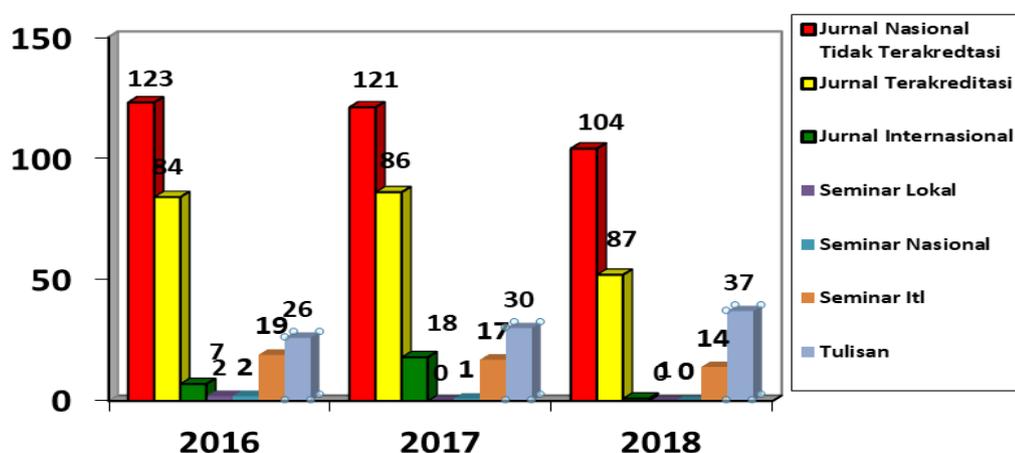
Produktivitas dan daya saing PTKI dapat dilihat dari tingkat akreditasi. Sampai akhir tahun 2019, jumlah program studi (prodi) yang ada di lingkungan PTKI mencapai 2.939. Sebanyak 76,11 persen dari jumlah total prodi yang ada telah terakreditasi, sementara 11,50 persen belum terakreditasi, dan 12,04 persen akreditasinya kadaluwarsa. Persentase jumlah prodi yang terakreditasi “A” mencapai 9,42 persen, lebih rendah dari jumlah total prodi yang telah terakreditasi.

Dalam hal perolehan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) oleh BAN-PT untuk pertama kalinya adalah pada tanggal 27 Juni 2015 dengan SK BAN-PT Nomor 633/SK/BAN-PT/Akrwed/PT/VI/2015 dengan nilai 309 Peringkat B. Dan setelah transformasi IAIN Antasari menjadi UIN Antasari, lembaga ini diharuskan mendapatkan asesmen surveilen. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, UIN Antasari mendapatkan nilai akreditasi perguruan tinggi dengan predikat B (Skor nilai akreditasi 317) berdasarkan SK BAN-PT Nomor 4416/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017 dan berlaku sejak tanggal 7 April 2017 hingga 27 Juni 2020. Hasil surveilan ini merupakan langkah afirmatif dalam mengukur posisi dan aksi tindak lanjut UIN Antasari serta pembenahannya, sehingga tercapai keberlangsungan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara komprehensif. Dengan demikian UIN Antasari mendapatkan pengakuan atas kinerja pengelolaan universitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik. Adapun akreditasi prodi, 1 prodi terakreditasi A dan 28 prodi terakreditasi B dan 8 prodi terakreditasi C

Predikat akreditasi di lingkungan PTKI berhubungan erat dengan sistem tata kelola PTKI. Walaupun sebagian kecil PTKI berhasil meningkatkan otonomi keilmuan dan keuangannya seperti dalam bentuk BLU, tetapi di sebagian sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan PTKI masih belum maksimal, terutama pada PTKI negeri yang baru. Sementara itu hal lain yang menyebabkan rendahnya capaian tingkat akreditasi adalah masih rendahnya kapasitas BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi per tahun karena kuantitas pengajuan yang sangat membludak mengingat adanya perubahan instrument akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi.

Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dapat publikasi artikel ilmiah dosen di lingkungan PTKI mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun artikelnya lebih banyak dipublikasikan dalam jurnal nasional, dan hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal yang bereputasi internasional. memberikan dampak terhadap capaian akreditasi di lingkungan PTKI.

Publikasi UIN Antasari Banjarmasin 2016-2018



Minimnya publikasi artikel ilmiah dosen dalam jurnal bertaraf internasional menjadi kendala dalam pemenuhan jumlah Guru Besar. Namun demikian potensi calon guru besar akan semakin meningkat dengan lulusnya peserta program 5.000 doktor. Akselerasi guru besar menjadi penting, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dosen, tetapi juga untuk meningkatkan produk publikasi ilmiah yang dampaknya akan meningkatkan peringkat akreditasi.

Program akselerasi guru besar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dimulai sejak tahun 2016. Program ini telah menghasilkan dan melahirkan sejumlah guru besar (profesor) dari berbagai disiplin ilmu PTKI. Program ini dilaksanakan melalui dua skema. Pertama, skema dalam bentuk Pelatihan Penulisan dan Penerbitan Artikel (karya ilmiah), Kedua, skema pelatihan Penulisan dan Penerbitan Artikel (karya ilmiah) bidang ilmu sosial dan sains Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Salah satu indikator daya saing perguruan tinggi keagamaan Islam yaitu proporsi terserapnya lulusan di dunia kerja. Sebanyak 82,20 persen lulusan PTKI terserap dalam dunia kerja. Capaian ini sedikit lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu 80,58 persen. Serapan terbesar masih sebagai karyawan (68,71 persen) di berbagai sektor ekonomi, sedangkan yang menjadi wiraswasta sebesar 11,19 persen.

1.3.3. Memantapkan Pendidikan Agama Islam

RPJMN IV 2020 – 2024 telah mengamanatkan untuk “Memantapkan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat integritas, etos kerja, dan gotong royong” dan “Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial”. Amanat ini dapat dilaksanakan melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diselenggarakan di berbagai tingkatan termasuk di perguruan tinggi umum. Pendidikan Agama Islam mempunyai peran dalam membentuk karakter dalam kehidupan mahasiswa. Pendidikan Agama Islam menjadi sarana transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan perilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya. Maka peran utama PAI adalah menjadi pengendali akhlak.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pendidikan Agama Islam akhir-akhir ini adalah meningkatnya gejala intoleransi. Hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2018) menyebutkan bahwa 51,1 persen siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan kelompok muslim yang berbeda, dan 34,3 persen siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan pemeluk agama lain. Ini diakibatkan rendahnya wawasan moderasi beragama di kalangan masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa. Rendahnya wawasan moderasi beragama disebabkan karena belum meratanya perolehan akses pendidikan agama Islam yang moderat, muatan kurikulum yang belum memadai, sedikitnya pendidik yang memenuhi kompetensi, dan lemahnya sistem manajemen pendidik PAI. Isu ini menjadi lebih berarti apabila pendidikan agama Islam juga diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menyebarkan pembelajaran Islam yang moderat seperti yang diamanatkan oleh RPJMN.

1.3.4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam

Era revolusi Industri 4.0 tidak saja berdampak pada sektor sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga dunia pendidikan. Di era ini, akses informasi sangat mudah didapatkan sehingga memungkinkan seseorang mendapatkan pengetahuan dan wawasan melalui kemajuan teknologi. (internet) Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembelajaran digital, sehingga dapat mendukung kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara daring (dalam jaringan)/ online learning dapat memberikan solusi kepada institusi pendidikan dalam melaksanakan kegiatan proses akademik, lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui smartphone, gadget atau laptop. Era revolusi digital ini menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya institusi pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

1.3.5. Memantapkan moderasi beragama

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Wahid Institut, terdapat sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1% dari kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal. Sedangkan sikap intoleransi masyarakat cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%. Di sisi lain, terdapat sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal; ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa. Munculnya sikap intoleransi dan radikalisme dipengaruhi—salah satunya— oleh faktor sosial-keagamaan, yaitu pemahaman literalis terhadap agama. Masalah ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Untuk menghadapi masalah ini, moderasi beragama menjadi cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman sikap intoleransi dan radikalisme. Moderasi beragama menjadi perspektif untuk memahami agama sebagai ajaran yang saling menghormati, memiliki fungsi penting di tengah masyarakat Indonesia, dan menjadi sumber nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk kemuliaan kemanusiaan.

Secara umum, implementasi moderasi beragama dilaksanakan dalam 3 (tiga) strategi, yaitu pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama.

Pada jenjang Perguruan Tinggi, moderasi beragama diawali dengan penyusunan pedoman pembelajaran dan penilaian pada PTKI yang memberikan rambu-rambu proses pembelajaran yang berperspektif moderasi. Rambu-rambu tersebut ditetapkan pada

pertengahan 2019. Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga menerbitkan edaran khusus terkait pengenalan moderasi beragama kepada mahasiswa terutama mahasiswa baru melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK). Untuk memastikan posisi perspektif moderasi, juga telah dilakukan penelitian yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: i) pemetaan moderasi di lingkungan madrasah, ii) pemetaan moderasi di lingkungan pesantren, dan iii) pemetaan moderasi di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan penelitian berperspektif moderasi yang bertujuan untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang dapat mewujudkan keadilan sosial, kedamaian, dan rahmatan lil alamin.

1.3.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pendidikan Islam perlu didukung dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, data pokok yang lengkap, valid, dan real time, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, organisasi dan tata laksana yang sesuai, sistem pelayanan birokrasi yang efisien, serta sistem penjaminan mutu yang baik. Namun demikian, sampai saat ini data pokok Pendidikan Islam yang lengkap, valid, dan real time belum dapat dihasilkan, terindikasi dari lambatnya data yang diperoleh beserta analisisnya (terlambat 2 tahun) dan belum lengkapnya cakupan data yang diperoleh (95 persen). Hal ini bermula dari lemahnya metode pengumpulan data. Dukungan yuridis untuk sistem pendataan satu pintu sudah diberikan, tetapi hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kendala koordinasi antar direktorat, sinkronisasi dan peningkatan (upgrading) perangkat lunak.

Saat ini, dikarenakan mendesaknya kebutuhan akan data yang akurat dan selalu mutakhir, masing-masing, Direktorat telah mengembangkan sistem pendataan on-line yang lebih baik, seperti PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) untuk PTKI. Upaya untuk membuat teknik pengumpulan data secara on-line di EMIS terkendala oleh tingkat kemampuan staf yang terbatas, termasuk dalam kemampuan mensinkronisasikan, sehingga diperlukan reformasi sistem pendataan on-line dan yang mampu mensinkronkan seluruh sistem pendataan yang sudah ada.

Dalam meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/KL-DIPA secara berkala setiap tahun dan laporan pelaksanaan program RKP, termasuk perencanaan program berwawasan gender. Masalah yang dihadapi adalah: (i) dokumen perencanaan belum mengakomodasikan program prioritas, (ii) indikator kegiatan dalam dokumen perencanaan belum menggambarkan pembagian kewenangan dalam mengimplemetasikan program di tingkat kelembagaan, (iii) belum adanya linieritas isi dokumen perencanaan di pusat dengan instansi vertikal dan satuan pendidikan di daerah; dan (iv) belum adanya sinergi dalam penyusunan Renstra antar eselon I di Kementerian Agama RI.

Masalah lain yang dihadapi adalah bahwa pemanfaatan anggaran untuk prioritas pembangunan pendidikan Islam belum dapat dioptimalkan karena terjadi tumpang tindih sasaran kegiatan antar unit dan kurangnya taat azas dalam menyusun perencanaan program dan anggaran pada Satker di pusat maupun di daerah. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, implementasi e-SOP dan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) belum lancar karena masih terkendala kelemahan sistem yang lebih tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang intensif.

Sistem tata kelola dan prosedur kerja juga masih perlu ditingkatkan walaupun dari segi pengelolaan keuangan sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian "WTP" dari BPK. Sementara dari segi integritas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi salah satu pilot proyek pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Agama. Reformasi birokrasi masih belum tuntas dilakukan, ditandai dengan capaian-capaian: (i) Indeks Reformasi Birokrasi 84/100, (ii) nilai Zone Integritas 80,73/100; dan (iii) nilai Pelayanan Publik 78/100. Belum tuntasnya capaian nilai reformasi birokrasi karena: (i) sistem tata kelola dan prosedur kerja masih sangat lambat sebagai akibat dari masih dilakukan secara manual, (ii) lambatnya penyusunan regulasi untuk kepastian hukum di pusat maupun daerah; (iii) beberapa regulasi yang ada masih terpisah-pisah, tidak sinkron, dan tumpang tindih, (iv) belum direvisinya peraturan perundangan yang kadaluwarsa.

Sejak awal tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanan terpadu ini mencakup pelayanan dalam urusan penyetaraan ijazah luar negeri, pengajuan pembukaan program studi pendidikan tinggi keagamaan, dan pengurusan izin dan tugas belajar. Kebijakan ini dapat mengakselerasi proses layanan publik dan meminimalisasi potensi-potensi yang tidak sesuai dengan tata kelola yang benar, misalnya meniadakan potensi adanya pungutan liar.

1.3.7. Kesetaraan Gender

Sistem tata kelola Pemerintahan mengamanatkan perlunya memperhatikan kesetaraan Gender. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, yang capaiannya diukur melalui Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sejalan dengan kebijakan tersebut PTKI telah memberikan akses yang lebih luas kepada mahasiswa perempuan dengan rasio mahasiswa perempuan terhadap laki-laki 1,4. Apabila dilihat lebih detail maka PTKI negeri, dengan variasi jumlah program studi yang lebih banyak, memberikan rasio 1,5 dibanding dengan rasio di PTKI swasta 1,24. Namun demikian, ketimpangan gender masih terjadi pada tenaga dosen, dengan rasio dosen perempuan terhadap laki-laki sebesar 0,52.

1.3.8. Analisis SWOT

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan UIN Antasari Banjarmasin yang lalu, mencermati kekuatan yang dimiliki, kendala yang dihadapi, serta mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi lima tahun mendatang, maka dapat dilakukan telaah strategik dengan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan isu-isu strategik dan perlu dipecahkan lima tahun mendatang. Telaah strategik yang dimaksud disajikan sebagaimana berikut:

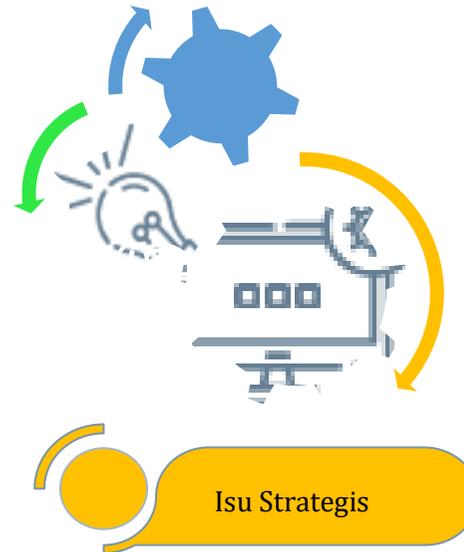
Analisis SWOT terhadap pemerataan akses pendidikan yang berkualitas

Kekuatan

- PTKI menjadi pilihan sebagian orang tua.
- Pendidikan bercisi khas Islam dan Pendidikan keagamaan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin
- Jumlah satuan Pendidikan cukup banyak dan tersebar sampai ke pelosok Tanah Air (3T).
- Sistem pengelolaan tersentralisasi memudahkan alih sumberdaya dalam rangka pemerataan mutu

Kelemahan

- Pemerintah menjamin akses KIP.
- Berbagai opsi untuk meningkatkan akses
- Berkembangnya informasi dan big data dapat diakses terbuka untuk bahan pembelajaran.
- Berkembangnya sistem pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk akselerasi akses.
- Antusiasme masyarakat menyelenggarakan Pendidikan tinggi besar.
- Tersedianya Program Pendidikan Kesetaraan yang fleksibel



Perlunya peningkatan akses Pendidikan Islam yang berkualitas dengan menjangkau ATS, menambah ruang kelas, mengendalikan ijin, dan meningkatkan akreditasi

Peluang

- APK PerguruanTinggi masih rendah 33,37%
- Munculnya lembaga Pendidikan baru (swasta) yang mutunya tidak terjamin
- Kesenjangan mutu Pendidikan antar daerah dan antara negeri dan swasta masih tinggi
- ATS mencapai 4,4 juta remaja usia kuliah
- Capaian akreditasi kelembagaan PTKI masih rendah

Ancaman

- Akses Pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM
- Pendudukan usia kuliah meningkat dalam struktur penduduk lima tahun ke depan
- Pemerataan Pendidikan yang berkualitas model dasar untuk pemerataan ekonomi.
- Tidak meratanya akses Pendidikan berkualitas dapat menjadi pemicu konflik sosial

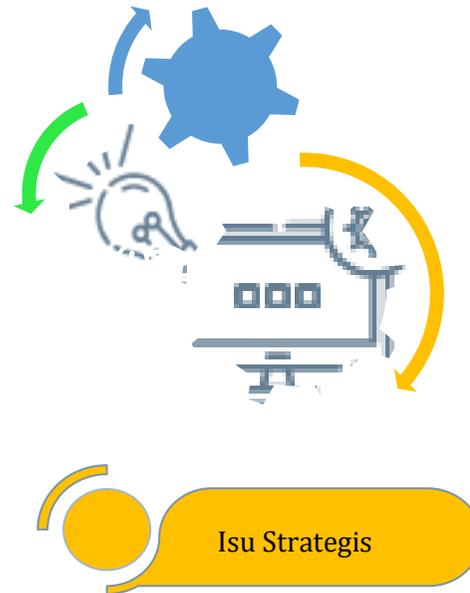
Analisis SWOT 7 Analisis SWOT terhadap kualitas pembelajaran dan pengajaran

Kekuatan

- Memiliki dosen dengan keahlian beragam bidang ilmu
- Pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi serta 4 pilar keilmuan, kebutuhan stakeholder, dan isu strategis nasional dan global.
- Pembelajaran berorientasi pada pengembangan akhlak melalui Ma'had al-jami'ah dan kaderisasi ulama melalui Program Khusus Ulama (PKU).
- Tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan civitas akademika tentang manfaat ICT
- Menjadi pusat kajian Islam dan budaya Banjar yang diproyeksikan menjadi referensi internasional
- Tingginya indeks kepuasan pengguna terhadap lulusan
- Memiliki unit kegiatan mahasiswa yang beragam dan pusat karier

Kelemahan

- Belum memiliki pedoman integrasi ilmu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Rendahnya peran aktif civitas akademika mempengaruhi ruang publik dengan memanfaatkan ICT
- Rendahnya tingkat penguasaan bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa secara umum
- Kesesuaian bidang kerja alumni dengan bidang ilmu masih rendah
- Belum terintegrasinya database prestasi mahasiswa dalam sistem informasi UIN Antasari



Isu Strategis

Integrasi ilmu, akhlak mulia, moderasi beragama, teknologi di era digital, bahasa asing, alumni, prestasi akademik dan non akademik

Peluang

- Kemudahan akses informasi terkait tentang pengembangan konsep integrasi ilmu
- Kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Beragamnya pilihan tempat melaksanakan kegiatan tridharma PT terutama di daerah 3T (tertinggal, terdalam, terluar)
- Perkembangan dan kemajuan ICT dan media pendukung pengelolaan manajemen
- Semakin diminatinya konsep kearifan lokal pada jurnal internasional bereputasi
- Banyaknya program belajar bahasa asing yang berbasis ICT
- Terbukanya peluang untuk mendirikan lembaga

Ancaman

- Tingginya degradasi moral yang terjadi di tengah masyarakat
- Perguruan tinggi lain sudah banyak memanfaatkan ICT secara komprehensif
- Tingginya standar penilaian kemampuan berbahasa asing bagi studi lanjut
- Persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif

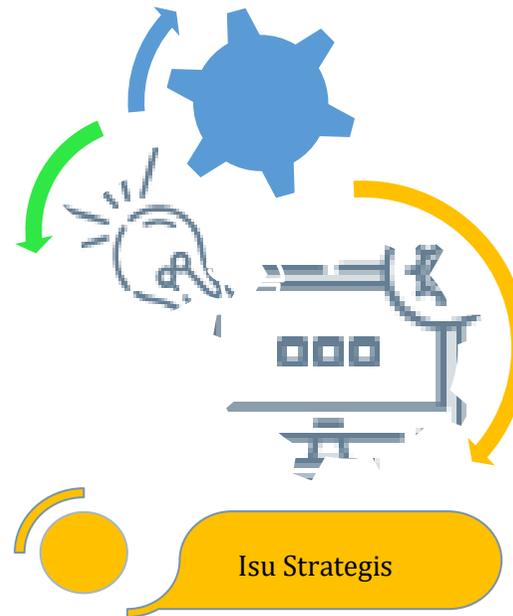
Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas

Kekuatan

- Sebagian orang tua memilih PTKI untuk puteranya karena kekuatan muatan agamanya
- Sebagian PTKI memiliki keunggulan komparatif di bidang keagamaan yang diakui di tingkat regional
- Nilai investasi perguruan tinggi lebih baik dari Pendidikan menengah
- Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu keagamaan

Peluang

- Kesesuaian bidang kerja alumni dengan bidang ilmu masih rendah.
- Apabila dibina, beberapa PTKI dapat ditingkatkan masuk perangkat regional
- Beberapa PTKIN memiliki keunggulan komparatif di bidang ilmu agama Islam
- Beberapa PTKIN berpotensi memiliki kelas internasional sebagai langkah pertama menuju *world class university*.



Peningkatan kualitas Pendidikan tinggi dengan fokus peningkatan status akreditasi, pengembangan keunggulan komparatif dan persiapan awal menuju *world class university*.

Kelemahan

- Penjabaran PP No. 46/2019 belum ada
- Sebagian besar PTKI (92%) adalah swasta, 46% prodinya memperoleh nilai C atau belum terakreditasi.
- Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 meningkat tetapi jumlahnya relative masih sedikit.
- Produktivitas hasil penelitian masih rendah
- Produk hasil penelitian (hak cipta, hak paten dsb.) masih terbatas jumlahnya.

Ancaman

- Adanya undang-undang tentang tunjangan kinerja pada satker.
- Kapasitas BAN-PT untuk visitasi terbatas mengancam efektivitas penyelenggaraan akreditasi
- Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan
- Prodi PTKI yang tidak terakreditasi terancam tidak berhak mengeluarkan ijazah.
- PTKI yang tidak terkreditasi, terancam

Analisis SWOT terhadap penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam

Kekuatan

- Moderasi beragama modal dasar dalam kerukunan bangsa dan mengatasi konflik.
- Sudah diterbitkan buku pedoman dan rambu-rambu implementasi moderasi beragama.
- Telah dilakukan rintisan pengarusutamaan moderasi beragama.
- Tersedia 170 instruktur nasional.
- Telah dirintis pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Agama yang berwawasan nilai budaya damai

Kelemahan

- Moderasi beragama belum sampai pada tahap implementasi.
- Paket pelatihan terstandar belum tersedia.
- Indeks kerukunan umat yang dicapai masih fluktuatif.
- Berkembangnya faham radikalisme di kalangan mahasiswa



Bagaimana menjadikan Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi menjadi instrumen untuk memperkuat moderasi beragama.

Peluang

- Akses memperoleh Pendidikan Agama Islam dijamin undang-undang.
- Dukungan lembaga keagamaan dan media terhadap Pendidikan Agama Islam yang moderat tinggi.
- Ditemukan beberapa praktek baik moderasi beragama dari kearifan lokal yang dapat diadopsi.

Ancaman

- Moderasi beragama strategis untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan.
- Indonesia yang plural dan multikultural berpotensi terjadinya konflik.
- Konflik sosial dan politik dapat menjadi konflik agama.
- Gerakan faham radikal sudah mempengaruhi pandangan peserta didik, yang bisa berdampak kepada timbulnya konflik.

Analisis SWOT terhadap pengelolaan dan penempatan pendidik

Kekuatan

- Jaminan kesejahteraan tenaga Pendidik telah dikukuhkan dengan UU.
- **Dosen** masih menjadi sumber belajar utama yang paling berpengaruh terhadap kompetensi lulusan.
- Masih adanya LPTK yang secara khusus dirancang mempersiapkan calon guru.
- Tersedianya data **dosen** *real time*.
- Adanya PKB, sistem yang menjamin peningkatan kompetensi **dosen** berkelanjutan.

Kelemahan

- Masih besar proporsi dosen yang belum memenuhi kompetensi minimal (belum bersertifikasi).
- Terbatasnya jumlah LPTK yang mampu menyelenggarakan PPG.
- Manajemen dosen PAI tidak jelas.
- LPTK belum menghasilkan guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar.



Kepastian pemenuhan jumlah **dosen** yang memadai dan berkompentensi, pemerataan penempatan, pengelolaan **dosen** agama, dan revitalisasi LPTK.

Peluang

- Proporsi yang akan pensiun lima tahun mendatang cukup besar, kesempatan mengangkat **dosen** yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi serta mengatur pemerataan penempatannya dapat dilakukan.
- LPTK bersedia untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
- Dibukanya opsi mengangkat **dosen** tetap non-PNS.

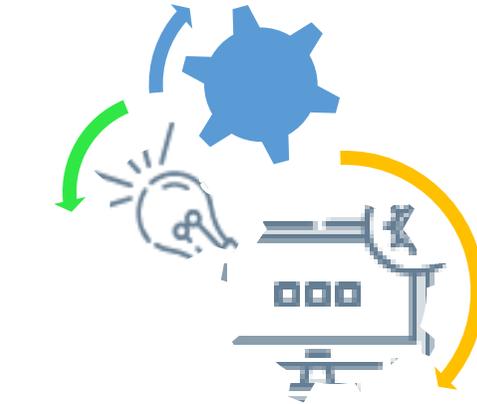
Ancaman

- Tanpa akselerasi peningkatan kompetensi **dosen**, pembelajaran di Kemenag dilakukan oleh banyak **dosen** yang tidak kompeten, yang berakibat kepada rendahnya mutu lulusan.
- Apabila jumlah **dosen** yang diangkat tidak seimbang dengan yang pensiun, Pendidikan di Kemenag akan kekurangan **dosen** secara masal

Analisis SWOT terhadap kualitas penjaminan mutu pendidikan

Kekuatan

- Landasan hukum untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sudah ada
- Sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh BAN-SM sudah berjalan.



Kelemahan

- Jumlah satuan Pendidikan yang memperoleh predikat akreditasi A masih rendah.
- Kapasitas BAN-PT untuk melakukan kunjungan Perguruan Tinggi terbatas.
- Belum jelasnya sistem penjaminan mutu eksternal bagi sebagian Pendidikan keagamaan Islam.



Bagaimanakah peningkatan kualitas dan manajemen Penjaminan mutu Pendidikan Islam dilakukan secara efektif dan berkesinambungan

Peluang

- Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal lebih menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.
- Lembaga Pendidikan yang memperoleh tingkat akreditasi tinggi memperoleh peluang untuk menyeleksi calon mahasiswa lebih ketat.
- Lembaga Pendidikan yang memperoleh tingkat akreditasi tinggi memperoleh peluang untuk memperoleh anggaran dari pemerintah dan masyarakat.

Ancaman

- Masyarakat menggunakan tingkat akreditasi satuan Pendidikan sebagai salah satu kriteria untuk memilih lembaga Pendidikan Islam
- Peringkat akreditasi lembaga Pendidikan Islam berhubungan dengan kelayakannya memperoleh bantuan anggaran dari pemerintah

Analisis SWOT terhadap kualitas mental/karakter mahasiswa

Kekuatan

- Kemendikbud telah mengidentifikasi 5 karakter utama dan 18 turunannya serta panduan pelaksanaannya (Permendikbud No. 20/2018).
- Lima karakter utama religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, menjadi komponen kualitas SDM yang berdaya saing.
- Lembaga pendidikan di Kemenag telah biasa mengajarkan Pendidikan karakter berbasis keagamaan, seperti akhlaqul karimah pada Pendidikan Islam

Kelemahan

- Pengintegrasian muatan Pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Kemenag belum optimal dilaksanakan.
- Pengembangan metode pembelajaran dan RPP yang mengintegrasikan muatan Pendidikan karakter belum dilakukan.
- Belum banyak tersedia dosen pelatih yang kompeten dosen/ rektor pendidikan keagamaan dalam Pendidikan karakter.



Bagaimanakah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam muatan kurikulum di semua jenis dan jenjang Pendidikan Islam

Peluang

- Dukungan orang tua dan masyarakat tinggi.
- Dengan melibatkan orang tua di rumah, hasilnya akan lebih optimal.
- Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di semua mata pelajaran, kegiatan intra maupun ekstra kurikuler.
- Sebagian Pendidikan di Kemenag berasrama, lingkungan dimana Pendidikan karakter dapat dilakukan lebih intensif termasuk melalui tauladan

Ancaman

- Dengan berkembangnya hedonisme, nilai karakter religiusitas, gotong royong, dan integritas terancam luntur di kalangan milenial.
- Apabila karakter nasionalisme tidak dibina, maka akan mengancam kelangsungan NKRI.

Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas

Kekuatan

- Landasan hukum penyelenggaraan PTK sudah ada (PP No. 46/2019)
- Sebagian orang tua memilih PTK untuk puteranya karena kekuatan muatan agamanya
- Sebagian PTK memiliki keunggulan komparatif di bidang keagamaan yang diakui di tingkat regional
- Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu keagamaan
- Daya serap lulusan PTKI di dunia kerja lebih baik
- Nilai investasi perguruan tinggi lebih baik dari Pendidikan menengah

Kelemahan

- Penjabaran PP No. 46/2019 tentang PTK belum ada
- Sebagian besar PTKI (92%) adalah swasta, 46% prodinya memperoleh nilai C atau belum terakreditasi.
- Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 meningkat tetapi jumlahnya relative masih sedikit.
- Produktivitas hasil penelitian masih rendah
- Produk hasil penelitian (hak cipta, hak paten dsb.) masih terbatas jumlahnya.



Peningkatan kualitas Pendidikan tinggi dengan fokus peningkatan status akreditasi, pengembangan keunggulan komparatif dan persiapan awal menuju *world class university*.

Peluang

- Apabila dibina, beberapa PTK dapat ditingkatkan masuk perangkat regional
- Beberapa PTKIN memiliki keunggulan komparatif di bidang ilmu agama
- Beberapa PTKIN berpotensi memiliki kelas internasional sebagai langkah pertama menuju *world class university*

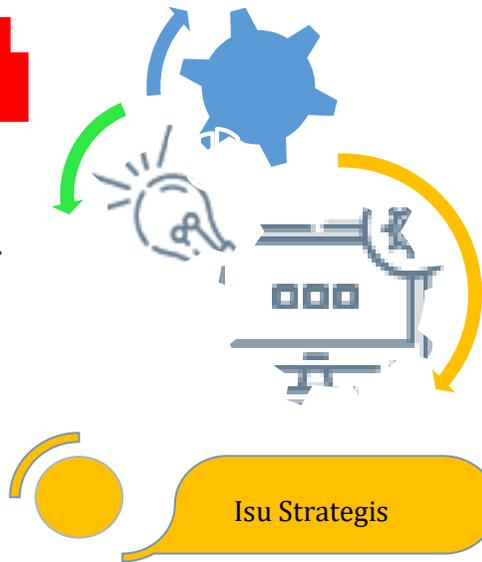
Ancaman

- Kapasitas BAN-PT untuk visitasi terbatas, mengancam efektivitas penyelenggaraan akreditasi
- Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan
- Prodi PTK yang tidak terakreditasi terancam tidak berhak mengeluarkan ijazah.
- PTK yang tidak terakreditasi, terancam dibekukan

Analisis SWOT terhadap kualitas tata kelola UIN Antasari Banjarmasin

Kekuatan

- o Indeks Reformasi sudah memperoleh nilai 84/100
- o Nilai Zone Integritas 80,73/100
- o Nilai pelayanan public 78/100
- o Dipilih sebagai Pilot Proyek Meningkatkan Indeks Zone Integritas.
- o Pelaksanaan kinerja zone integritas semakin luas
- o Audit berbasis resiko sudah dilaksanakan dengan baik.



Kelemahan

- o Manajemen ASN belum dilakukan dengan baik
- o Sistem manajemen asset belum sempurna
- o Sistem pendataan masih parsial, *out of date*, dan belum terintegrasi dan dapat dikonsolidasikan
- o Belum ada sistem pengendalian dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan berbasis Renstra
- o Sistem tata kelola dan prosedur kerja masih lamban
- o Penyusunan regulasi lambat dan isinya sering tumpang tindih.

Peningkatan tata Kelola **UIN Antasari** dengan fokus pada manajemen ASN kualitas data, dan percepatan prosedur kerja dengan memanfaatkan TIK

Peluang

- o Potensi pemasukan PNBP masih besar, tetapi belum digali secara optimal
- o Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada
- o Melalui big data, dengan mudah mengintegrasikan data Pendidikan Islam dan Keagamaan Islam dengan data terkait di luar Kemenag

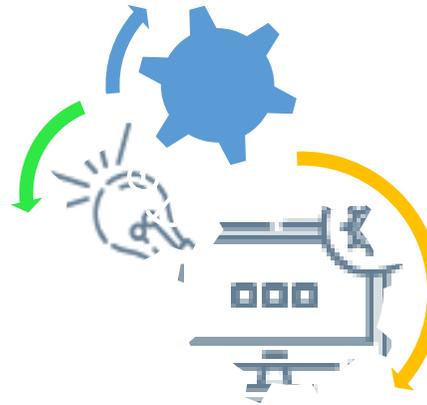
Ancaman

- o Perkembangan system informasi yang tanpa batas mempengaruhi terhadap pembinan terhadap dosen dan tendik dengan lingkup pengawasan dalam berbagai aspek
- o Sistem komunikasi organisasi yang masih tradisional menjadi hambatan dalam efektivitas pengendalian organisasi.

Analisis SWOT terhadap penguatan pengarusutamaan/kesetaraan gender

Kekuatan

- IPG di PTKI 1,40 (> 1,00)
- Kesetaraan gender di kalangan siswa dan mahasiswa sudah baik dan meningkat.
- Peluang bagi siswa perempuan untuk memperoleh keunggulan di bidang akademik tinggi.



Peluang

- Kebijakan Pemerintah menggunakan pengarusutamaan gender sebagai nilai budaya yang melandasi pembangunan (RPJMN 2020-2024).
- Apabila dikelola dengan baik, kesetaraan gender dapat meningkatkan daya kompetiveness yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas.
- Penerapan pengarusutamaan gender dapat mengurangi konflik

Kelemahan

- Kesetaraan gender di lembaga birokrasi dan pengelolaan satuan Pendidikan masih rendah.
- Ketimpangan gender masih terjadi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya.
- Data gender di lingkungan birokrasi belum tersedia sepenuhnya.



Bagaimana meningkatkan Pengarusutamaan gender di kalangan birokrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan produktivitas

Ancaman

- Kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga global.
- Penyimpangan dari kesetaraan gender dapat menimbulkan konflik.

Analisis SWOT dalam Bidang Penelitian

Kekuatan

- Pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi serta 4 pilar keilmuan, kebutuhan stakeholder, dan isu strategis nasional dan global
- Menjadi pusat kajian Islam dan budaya Banjar yang diproyeksikan menjadi referensi internasional
- Telah menerapkan standar tingkat plagiasi pada karya ilmiah mahasiswa pascasarjana.
- Memiliki beberapa jurnal yang terakreditasi nasional Sinta.
- Antusias dosen yang meningkat untuk berkompetisi mengikuti program dana hibah penelitian.
- Tersedianya reward penelitian dosen yang diakomodir melalui DIPA UIN Antasari.

Peluang

- Banyaknya jurnal nasional terakreditasi di Sinta.
- Banyaknya publikasi ilmiah yang dapat diakses dengan mudah.
- Akses kerjasama penelitian batas negara dan kesempatan kolaborasi riset dengan negara timur tengah.
- Terbukanya kesempatan berkolaborasi dengan dengan antar lembaga dan lintas keilmuan.
- Pusat peradaban Islam Kalimantan berada di Kalimantan Selatan.



Kelemahan

- Karya ilmiah dosen UIN Antasari dalam jurnal internasional bereputasi, media massa internasional, dan keaktifan dalam organisasi internasional kurang memadai.
- Skill Academic Writing dosen dan mahasiswa berbasis ICT masih rendah.
- Kurangnya penelitian kolaboratif antar dosen, antar mahasiswa, antar lembaga lintas keilmuan.
- Belum banyaknya pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga/industri terkait.
- Kurangnya Partisipatory Action Research (PAR) dikalangan dosen.

Ancaman

- Maraknya jurnal predator baik tingkat nasional dan internasional.
- Minimnya saluran sumber dana penelitian dan PkM dari luar negeri.
- Meningkatnya persaingan dalam memperoleh dana hibah pendidikan, penelitian, dan pengabdian di lingkup Kementerian Agama tingkat pusat.
- Mulai banyaknya perguruan tinggi yang mensinergikan hasil penelitian dan PkM dengan industri.

Analisis SWOT dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kekuatan

- Memiliki dosen dengan keahlian berbagai bidang ilmu.
- Tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan civitas akademika tentang manfaat ICT.
- Menjadi pusat kajian Islam dan budaya banjar yang diproyeksikan menjadi referensi internasional.
- UIN Antasari dipercaya oleh berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan PkM baik oleh dosen dan mahasiswa melalui program desa binaan dakwah melalui media, program KKN tematik, KKN Nusantara, KKN Ekspedisi Nusantara Jaya (KKN maritim), KKN Internasional, dan program madrasah binaan.
- Memiliki website tiga bahasa untuk penyebaran informasi secara internasional.

Peluang

- Beragamnya pilihan tempat melaksanakan kegiatan tridharma PT terutama di daerah 3T (tertinggal, terdalam, terluar).
- Perkembangan dan kemajuan ICT dan media pendukung pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi yang makin efektif dan efisien.
- Pusat peradaban Islam Kalimantan berada di Kalimantan Selatan.



Kelemahan

- Kurangnya Partisipatory Action Research (PAR) dikalangan dosen.
- Kurangnya karya ilmiah dosen UIN Antasari yang terbit dalam jurnal internasional.
- Kurangnya publikasi kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa.
- Belum maksimalnya integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Ancaman

- Persaingan dengan perguruan tinggi lain yang banyak mengangkat tema kearifan lokal pada tingkat internasional.
- Minimnya saluran sumber dana penelitian dan PkM dari luar negeri.
- Meningkatnya persaingan dalam memperoleh dana hibah pendidikan, penelitian, dan pengabdian di lingkup Kementerian Agama tingkat pusat.
- Mulai banyaknya perguruan tinggi yang mensinergikan hasil penelitian dan PkM dengan industri.

Analisis SWOT dalam Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Kekuatan

- Tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan civitas akademika tentang manfaat ICT.
- Menjadi pusat kajian Islam dan budaya banjar yang diproyeksikan menjadi referensi internasional.
- UIN Antasari telah mengimplementasikan good university governance terbukti dengan memiliki predikat WBK.
- Aset (terutama tanah dan bangunan) memadai untuk pemanfaatan BLU dan program studi baru.
- Memiliki daya tarik nasional dan internasional terutama di Asia.
- Memiliki website tiga bahasa untuk penyebaran informasi secara internasional.



Tata Kelola WBK-WBBM, Kerjasama Internasional, Akreditasi, Prodi Umum, Kompetensi SDM, Reputasi Internasional

Kelemahan

- Kesesuaian bidang kerja alumni dengan bidang ilmu masih rendah.
- Karya ilmiah dosen UIN Antasari dalam jurnal internasional bereputasi, media massa internasional, dan keaktifan dalam organisasi internasional kurang memadai.
- Belum banyaknya pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga/industri terkait.
- Masih berstatus PT Satker.
- Masih banyak program studi yang belum terakreditasi A (unggul) dan masih ada program studi yang masih terakreditasi C (baik).

Peluang

- Perkembangan dan kemajuan ICT dan media pendukung pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi yang makin efektif dan efisien.
- Terbukanya kerjasama peningkatan keterampilan dan keahlian profesi yang tersertifikasi.
- Terbukanya peluang untuk mendirikan lembaga sertifikasi profesi (LSP).
- Permintaan tinggi dari masyarakat untuk membuka program studi umum.
- Diminati oleh calon mahasiswa asing terutama di daerah Asia Tenggara.

Ancaman

- Adanya undang-undang tentang tunjangan kinerja pada satker.
- Perubahan kebijakan Kementerian Agama tentang penilaian kinerja berbasis manajemen mutu.
- Pengawasan yang semakin ketat dalam hal tata kelola baik dari Itjen, BPK, BPKP, KPK, dan Peraturan Perguruan Tinggi.
- Tuntutan stakeholders terhadap standar layanan yang semakin tinggi.
- Semakin ketatnya penilaian akreditasi dengan kriteria 9.
- Susahnya prosedur pembukan program studi umum bagi PTKI.

Analisis SWOT dalam Bidang Sarana Prasarana

Kekuatan

- Aset (terutama tanah dan bangunan) memadai untuk pemanfaatan BLU dan program studi baru.
- Memiliki website tiga bahasa untuk penyebaran informasi secara internasional.
- Memiliki unit-unit pelayanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa (Ma'had Al Jamiah, UPKK, UPB, Perpustakaan, Klinik)
- Banyak dosen muda UIN Antasari mempunyai kemampuan bahasa asing yang memenuhi syarat studi lanjut S3.
- Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana dilakukan melalui asas ketaatan terhadap regulasi dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- Memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendirikan lembaga layanan informasi publik.

Peluang

- Perkembangan dan kemajuan ICT dan media pendukung pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi yang makin efektif dan efisien.
- Diminati oleh calon mahasiswa asing terutama di daerah Asia Tenggara.
- Banyaknya tawaran beasiswa dari berbagai lembaga.
- Banyaknya beasiswa studi lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri (5000 Doktor, LPDP, AAS, Chavening, Fullbright).
- Skema pendanaan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana melalui SBSN.



Kelemahan

- Belum optimalnya program kerja UPB UIN Antasari bagi dosen dan mahasiswa.
- Karya ilmiah dan keaktifan dalam organisasi di tingkat internasional masih rendah.
- Sedikitnya jumlah mahasiswa penyandang disabilitas.
- Masih sedikitnya jumlah guru besar
- Rasio perbandingan luas kapasitas infrastruktur masih rendah.
- Berbagai media pendukung pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi masih belum banyak yang terintegrasi.
- Belum memiliki lembaga layanan informasi

Ancaman

- Tingginya standar penilaian kemampuan berbahasa asing bagi studi lanjut. (T4)
- Susahnya prosedur pembukan program studi umum bagi PTKI. (T16)
- Ketatnya regulasi pemerintah dalam mengatur pengadaan infrastruktur dan sarana, prasarana. (T19)
- Potensi refocusing anggaran karena kebijakan strategis pemerintah selama pandemi. (T20)
- Meningkatnya kasus cybercrime secara global. (T21)

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi



Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024:
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berdasarkan Gotong Royong

Visi Kementerian Agama 2020-2024
Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat
yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

Visi UIN Antasari Antasari Banjarmasin
Menjadi Universitas yang Unggul dan Berakhlak



2.1 Visi

Visi “menjadi universitas yang unggul” sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 mengenai “terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Mandiri”, sebagaimana juga serasi dengan visi “Kementerian Agama yang profesional dan andal”

Sedangkan visi “berakhlak” serasi dengan visi Indonesia “berkepribadian berdasarkan gotong royong”, sebagaimana sejalan dengan visi Kementerian Agama “membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Makna turunan dari “unggul” di atas dalam visi UIN Antasari berarti istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global di kawasan Asia pada 2024. Keunggulan ini merupakan empat pilar filosofi keilmuan yang uraiannya sebagai berikut:

1. Integrasi dinamis, yaitu integrasi ilmu yang mempertemukan ilmu-ilmu alam, sosial dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga saling memperkaya (mutually enriching), saling memperbaharui (mutually renewing) dan saling mencerahkan (mutually illuminating).
2. Integrasi Islam dan kebangsaan, yakni mengembangkan nilai-nilai keislaman yang mengakui eksistensi negara bangsa Indonesia sehingga terjadi titik temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan ini penting dalam orientasi kajian-kajian ilmiah agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

3. Berbasis lokal, yakni kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial masyarakat Banjar secara regional, dan Indonesia secara nasional, yang berbasis pada kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4. Berwawasan global, yakni kajian keilmuan yang diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi dari globalisasi kehidupan era teknologi digital. Dengan demikian, kajian keilmuan tidak hanya terlibat dalam mengkaji isu-isu global, melainkan juga berkontribusi bagi peradaban dunia.

Adapun makna dari “berakhlak” adalah menjadi perguruan tinggi yang menanamkan nilai-nilai budi luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.

Secara ringkas, Visi UIN Antasari Banjarmasin adalah:

Unggul dalam Keilmuan, Berakhlak dalam Kepribadian

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi UIN Antasari, maka perlu mengacu pada misi Kementerian Agama sebagai berikut:



Sumber: Renstra Kementerian Agama 2020-2024

Misi pertama (yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5); Misi kedua (yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5; Misi ketiga (yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3); Misi keempat (yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3; Misi kelima (yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya

saing pendidikan) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan Misi keenam (yaitu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

Sejalan dengan misi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan, maka Misi UIN Antasari adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
2. Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam berstandar lokal, nasional dan internasional
3. Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berstandar lokal, nasional dan internasional;
4. Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;

Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Civitas Akademika dan stakeholders

2.3 Tujuan

Tujuan Renstra UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:



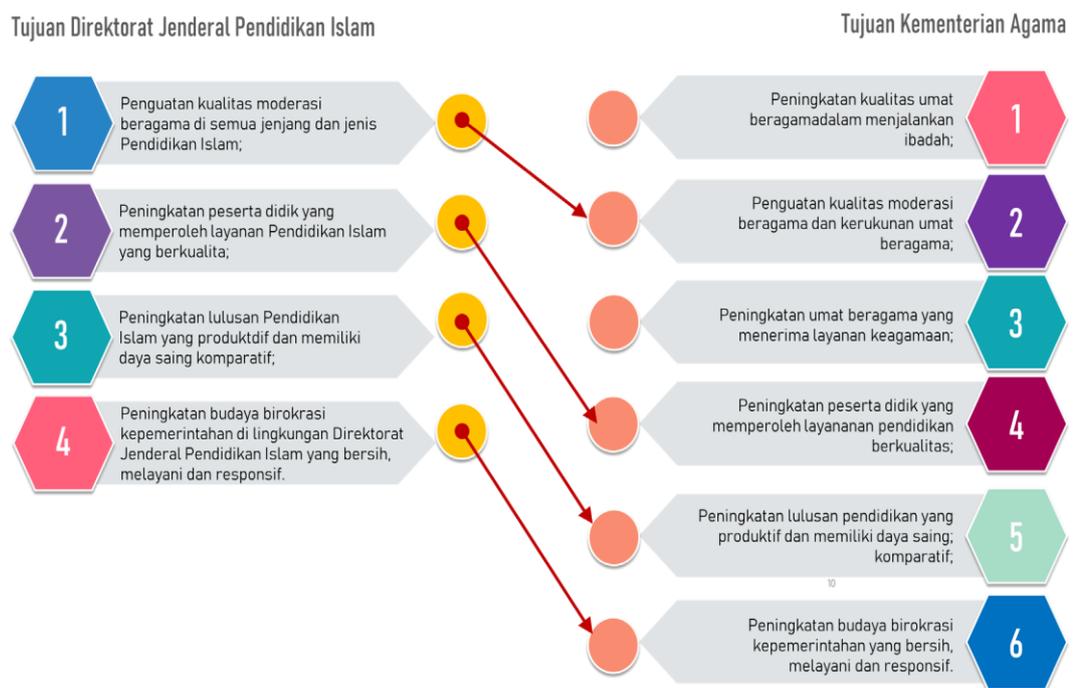
Gambar. Tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia

Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6.

Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (i) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (ii) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (iii) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (iv) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif; (tujuan 6).

Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.



Gambar. Hubungan tujuan Direktorat Pendidis dengan tujuan Renstra Kementerian Agama

Merujuk pada tujuan kementerian Agama dan Direktorat Pendidikan Islam Statuta, maka tujuan UIN Antasari Banjarmasin adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global;
2. Menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat;

3. Terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
5. Menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.

Mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional, tujuan Kementerian Agama RI, serta tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka Tujuan UIN Antasari Tahun 2020-2024 selaras dengan tujuan-tujuan tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

No	TUJUAN KEMENAG 2020-2024	TUJUAN DITJEN PENDIS 2020-2024	TUJUAN UIN ANTASARI 2020-2024
1	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam	Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, dan berwawasan global
2	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas	Menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.
3	Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, dan berwawasan global
			Menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat.
			Terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat	Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas

yang bersih, melayani, dan responsif.

Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan

2.4 Sasaran Strategis

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran strategis UIN Antasari 2020-2024 selain mengacu kepada sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 di atas, juga mengacu pada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020-2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama. Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup tiga program prioritas, yaitu:
 - a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Penguatan moderasi beragama.
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas yaitu:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan

13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

2.5 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis UIN Antasari mengacu pada tiga belas Sasaran Strategis Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang ditetapkan dalam Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang relevan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (SS.2)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama di Perguruan Tinggi
Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan (SS.7)	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan (SP.4.1)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik (SS.8)	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan Pendidikan (SP.3.3)	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kualitas penjaminan mutu Pendidikan (SS.9)	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.3.5)	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
		Meningkatnya budaya mutu pendidikan
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.11)	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat (SP.5.1)	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.11)	Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik (SP.5.2)	Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya kualitas LPTK

	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan
	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5)	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK
	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Meningkatnya kualitas lulusan PTK
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS.12)	Meningkatnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
		Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
		Meningkatnya ASN yang profesional
		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan

2.6 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Dalam pelaksanaan Renstra UIN Antasari yang disesuaikan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan pengukuran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
1	SP.5.1	Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat	IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah nilai ujian pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi dengan jumlah mahasiswa	Fak/ Pasca	Triwulan
			IKSK. 5.2132.1.1	Persentase mahasiswa yang di bina dalam moderasi beragama	jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi dengan jumlah mahasiswa	Rumah moderasi	Triwulan
			IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen yang di bina dalam moderasi beragama	Jumlah dosen yang dibina dalam moderasi beragama dibandingkan dengan jumlah dosen	Rumah moderasi	Triwulan
2	SP. 4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	Jumlah mahasiswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah mahasiswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Biro AAKK/ Mikwa	Triwulan
3	SP 5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (pada satuan pendidikan)	IKSP.5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat pendidik	Persentase jumlah dosen bersertifikat pendidikan dibandingkan dengan jumlah dosen	LPM	Triwulan
			IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 dibagi jumlah total dosen	Biro AUPKK	Triwulan

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
	SK.5.2132.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	Persentase jumlah prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring dibandingkan dengan jumlah prodi	Fak/Pasca	Triwulan
	SK.5.2132.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persentase jumlah Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi dibandingkan dengan jumlah dosen (contoh : Shortc course, post doctoral, pengiriman dosen untuk mengikuti seminar, pelatihan dll)	Fak/Pasca	Triwulan
			IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga Kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi		Biro AUPKK	Triwulan
	SK.5.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	Persentase jumlah prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dibandingkan dengan jumlah prodi berdasarkan Standar Akreditasi Program Studi	Fak/Pasca	Triwulan
	SK.5.2132.5	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	Persentasi jumlah mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa	Biro AAKK/ Mikwa	Triwulan
			IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah mahasiswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Biro AAKK/ Mikwa	Triwulan
			IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	Persentase jumlah mahasiswa lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magester lanjut Doktor dibanding jumlah lulusan S1 Tahun berjalan	Pasca	Triwulan

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
	SK.5.2132.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	IKSK.5.2132.7.2	Persentase Program studi yang menyelenggarakan sistem kampus merdeka	Persentase jumlah Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka dibandingkan dengan jumlah prodi	LPM	Triwulan
	SK.5.2132.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan.	IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibandingkan dengan jumlah mahasiswa	Fak/Pasca	Triwulan
			IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen yang menjadi narasumber kompresi nasional maupun internasional	Persentase jumlah dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional dibandingkan dengan jumlah dosen PNS dan Non PNS	Fak/Pasca	Triwulan
	SK.5.2132.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas permanfaat anggaran pendidikan	IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada PTKIN terhadap seluruh sumber daya pendidikan.	Persentase jumlah anggaran PNBP dan PNBP-BLU dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran tahun berjalan	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	Persentase jumlah Anggaran BOPTN dibandingkan dengan total anggaran	Biro AUPKK	Triwulan
	SK.5.2132.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional	IKSK.5.2132.11.1	Persentase program studi PTKI yang memenuhi standar Akreditasi Internasional	Jumlah Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional dibandingkan dengan jumlah prodi	LPM	Triwulan
			IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	Jumlah kolaborasi internasional yang dilakukan UIN Antasari dibandingkan dengan jumlah seluruh kerjasama	WR 3/ WD 3	Triwulan
			IKSK.5.2132.3	Peresentasi kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	Jumlah kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran dibandingkan seluruh jumlah kerjasama	WR 3/ WD 3	Triwulan

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan	
			IKSK.5.2132.11.4	Peresentasi kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	Jumlah kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang penelitian dan publikasi dibandingkan seluruh jumlah kerjasama	WR 3/ WD 3	Triwulan	
			IKSK.5.2132.11.5	Peresentasi kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	Jumlah kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat dibandingkan seluruh jumlah kerjasama	WR 3/ WD 3	Triwulan	
	SK.5.2132.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK	IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HAKI dibandingkan dengan jumlah seluruh hasil penelitian	LP2M	Triwulan	
			IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan hak paten	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan hak paten dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian	LP2M	Triwulan	
	SK.5.2132.13	Meningkatkan kualitas lulusan PTK	IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan dibanding jumlah seluruh kerjasama	UPKK	Triwulan	
			IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah lulusan. Lulusan Tepat Waktu : 4.5 Tahun	Biro AAKK/ Mikwa	Triwulan	
			IKSK.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI			Biro AAKK/ Mikwa	Triwulan
				Rerata masa studi mahasiswa S1	Rerata masa studi mahasiswa S1		Mikwa/Fak/Pasca	Triwulan
				Rerata masa studi mahasiswa S2	Rerata masa studi mahasiswa S2		Mikwa/Fak/Pasca	Triwulan
	Rerata masa studi mahasiswa S3	Rerata masa studi mahasiswa S3			Mikwa/Fak/Pasca	Triwulan		

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
			IKSS11.1	Presentasi PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	Jumlah prodi/kelas internasional dibandingkan dengan jumlah prodi	Fak/ Pasca	Triwulan
			IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan dibandingkan dengan jumlah lulusan	UPKK	Triwulan
			IKSS11.3	Presentasi artikel ilmiah di jurnal internasional	Jumlah artikel ilmiah di jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah artikel ilmiah di jurnal	LP2M	Triwulan
			IKSS11.4	Presentasi artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	Jumlah artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi dibandingkan dengan jumlah artikel ilmiah di jurnal internasional	Fak/ Pasca/ LP2M	Triwulan
4	SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	IKSP.5.3.1	Persentase program studi yang terakreditasi A/Unggul	Jumlah Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi A/Unggulan dibandingkan dengan jumlah prodi	Fak/ Pasca/ LPM	Triwulan
5	SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional	IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	Persentase jumlah PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional dibagi jumlah total PTK	WR 1	Triwulan
			IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing	Peningkatan persentase jumlah mahasiswa asing tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah tahun 2022	WR 3	Triwulan
6	SP. 5.5	Meningkatkan kualitas pemanfaatan penelitian	IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional dibandingkan dengan jumlah ilmiah	LP2M	Triwulan
	SP. 5.6	Meningkatkan kualitas lulusan	IKSP.5.6.2	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S1	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S1	Fak/ Pasca	Triwulan

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
		PTK yang diterima dunia kerja		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S2	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S2	Fak/ Pasca	Triwulan
				Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S3	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S3	Fak/ Pasca	Triwulan
			IKSP.5.6.3	Rentan masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan (mahasiswa lulusan tahun sebelumnya)	WD3/ UPKK	Triwulan
	SP. 1.6	meningkatnya tata kelola organisasi (unit eseleon I) yang efektif dan akuntabel	IKSP.16.1	Presentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dibagi jumlah hasil pemeriksaan	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSP.1.6.2	Nilai penilaian mandiri pelaksana repormasi Birokrasi (PMPRB)	Menggunakan hasil Penilaian Mandiri PMPRB dengan aplikasi PMPRB Kemenpan RB	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSP.1.6.3	Nilai sistem Akutansibilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	Nilai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Menggunakan hasil penilaian SPIP oleh Aparat Pengendalian Intern Pemerintah Kemenag dengan instrumen dari BPKP	Biro AUPKK	Triwulan
SK.5.2135.1	meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	IKSP.5.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan	Biro AUPKK/ SPI	Triwulan	
							SK.5.2135.2

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSP/ IKSK		Cara Perhitungan	Sumber Data	Periode Pelaporan
			IKSK.5.2135.2.2	Presentasi produk hukum pengawasan yang diharmonisasi/ diterbitkan	Presentasi produk hukum pengawasan yang diharmonisasi/ diterbitkan dibandingkan dengan jumlah seluruh produk hukum	Biro AUPKK / SPI	Triwulan
	SK.5.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	IKSK.1.2135.3.1	persentase keselarasan muatan renja dengan renstra	persentase keselarasan muatan renja dengan renstra dibandingkan dengan jumlah seluruh muatan renja dan renstra	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSK.1.2135.3.2	Nlai penerapan anggaran dan pencapaian output belanja	pencapaian output belanja dibandingkan dengan nilai penerapan anggaran	Biro AUPKK	Triwulan
			IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai barang milik negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Jumlah nilai barang milik negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibanding jumlah seluruh barang milik negara	Biro AUPKK	Triwulan
	SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional	IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibandingkan dengan jumlah seluruh ASN	Biro AUPKK	Triwulan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN KERANGKA
PENGENDALIAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam Renstra 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan dengan merujuk pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah melalui peningkatan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, dan kinerja penyuluh agama.
2. Kebijakan dalam meningkatnya kerukunan umat beragama dititikberatkan pada peningkatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dalam rangka menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama.
3. Kebijakan peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama.
4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal dengan memenuhi standar dan melakukan digitalisasi layanan.
5. Kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan
6. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran.
7. Kebijakan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, diarahkan pada peningkatan kapasitas kelas (*siting capacity*) didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya pada daerah 3T), menarik kembali Anak yang Tidak Sekolah (ATS) dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.
8. Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan, penempatan guru dan tenaga kependidikan dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja,

- pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.
 10. Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada peningkatan karakter siswa dalam 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya.
 11. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional
 12. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi.
 13. Kebijakan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan, difokuskan untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pengambilan kebijakan yang akurat

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama menetapkan 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/ MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga tahun 2021 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Berdasarkan surat bersama tersebut maka mulai tahun 2021, Kemenag menjalankan arah kebijakan melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;

4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan program prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan pendidikan selain melalui 5 program di atas, Kementerian Agama juga melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, lembaga swasta, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga internasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajib Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragamat, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan strategi sebagai berikut:

- 1 Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - b. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - d. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
 - g. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- 2 Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang dan tingkat pendidikan;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dasar pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
- 3 Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti:
 - i. madrasah satu atap,
 - ii. madrasah inklusi,
 - iii. kelas filial,
 - iv. pembelajaran daring,
 - v. kampus jauh dan:
 - vi. revolusi pembelajaran

- b. afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi:
 - i. peserta didik di daerah 3 T,
 - ii. peserta didik yang kurang beruntung,
 - iii. memperhatikan kewilayahan
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;
 - d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. penjaringan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan PAUD, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. Perintisan penergian RA sebagai RA percontohan;
 - i. mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu;
 - j. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
 - k. peningkatan life-skills penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan *teaching factory*
- 4 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan
 - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - g. pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata berbasis kebutuhan, khususnya di daerah 3T
 - h. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik yang kompeten;
 - i. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya;

- 5 Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/PendidikanKeagamaan;
 - d. peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
 - e. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.

- 6 Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
 - c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
 - d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama;
 - e. Memperkuat kerjasama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

- 7 Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/ dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal) ;
 - b. pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu;
 - c. pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;
 - d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - f. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - g. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional;
 - h. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - i. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya

- inovatif;
- j. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja;
 - k. fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
- 8 Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, uptodate*, dan terdigitalisasi;
 - b. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
 - c. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
 - d. penguatan *public campaign/ mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB
 - e. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
 - f. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - g. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.
 - h. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.
 - i. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
 - j. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan
 - k. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan
 - i. memanfaatkan teknologi;
 - l. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
 - m. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - n. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
 - o. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 4 (empat) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pendidikan Tinggi
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 9 (sembilan) kegiatan untuk mendukung program yang telah ditetapkan tersebut. Adapun jenis kegiatan dan

penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM		KEGIATAN		DIREKTORAT PENANGGUNGJAWAB
1	Dukungan manajemen	1	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Sekretariat
2	Pendidikan Tinggi	2	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	PTKI
		3	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	PD Pontren
3	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	4	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	GTK
		5	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	KSKKM
		6	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	PD Pontren
		7	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	PAI

	8	Peningkatan Akses Madrasah Yang Berkualitas	KSKKM
	9	Peningkatan Akses Pendidikan Keagamaan Islam Yang Berkualitas	PD Pontren

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

UIN Antasari sebagai Lembaga Pendidikan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, sudah semestinya memiliki arah kebijakan yang selaras terhadap arah kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Diantara 8 arah kebijakan dan strategi yang selaras dan diadaptasi sesuai dengan tugas UIN Antasari sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam antara lain:

- 1 Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - b. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama;
 - c. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - d. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
- 2 Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal;
 - b. Pengembangan rambu-rambu integrasi ilmu;
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar mahasiswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif

dalam perkuliahan;

- 3 Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti:
 - i. pembelajaran daring,
 - ii. kampus jauh dan:
 - iii. revolusi pembelajaran
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;
 - c. pemberian bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - d. diverifikasi satuan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
 - f. peningkatan life-skills penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan *teaching factory*
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan;
 - h. Sistem perencanaan penyediaan sarana-sarana penunjang yang bermutu;
 - i. Pembukaan Program Studi dan Fakultas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan
 - b. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - d. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - e. peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
 - f. Pengangkatan dosen berdasarkan keahlian yang dibutuhkan Program Studi;
 - g. Pengusulan Guru Besar dan Lektor Kepala berdasarkan kualifikasi akademik kompetensi profesional, dan kebutuhan Program Studi;
 - h. Peningkatan kompetensi profesi dosen;
 - i. Kuliah tamu dari kalangan profesional;
 - j. Pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

yang berprestasi;

- 5 Peningkatan peringkat akreditasi, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja prodi;
 - d. meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Pendidikan Keagamaan;
 - e. peningkatan peran mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
- 6 Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
 - b. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama;
 - c. Menguatkan kerjasama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
 - d. Peningkatan pembinaan bakat minat mahasiswa bidang akademik dan non akademik;
 - e. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga luar negeri;
 - f. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi keilmuan nasional dan Internasional.
- 7 Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/ dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal) ;
 - b. Pengembangan dan peningkatan layanan UPKK;
 - c. Peningkatan penyediaan fasilitas coaching, training maupun mentoring untuk kegiatan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*);
 - d. pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;
 - e. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf

- internasional;
- i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - j. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - k. fasilitasi PTKI untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
- 8 Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, uptodate*, dan terdigitalisasi;
 - b. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
 - c. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
 - d. penguatan *public campaign/ maintstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB
 - e. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
 - f. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - g. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.
 - h. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.
 - i. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
 - j. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan
 - k. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
 - l. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
 - m. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - n. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
 - o. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;
 - p. Pengembangan sistem manajemen terpadu berbasis manajemen risiko
 - q. Penyiapan sistem tata Kelola BLU
 - r. Pengusulan transformasi dari PT Satker ke BLU
 - s. Penguatan dan pengembangan layanan berbasis elektronik
 - t. Pelaksanaan kinerja berbasis IKU Universitas dan Fakultas/Ps/Unit
 - u. Peningkatan kualitas standar pelayanan berbasis manajemen mutu
 - v. Peningkatan status Lembaga dari WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju WBBM (Wliayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

Selain mengadaptasi arah kebijakan dan strategi yang dimiliki Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama, UIN Antasari sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi juga memiliki kewajiban dalam pemenuhan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, disusun pula arah kebijakan dan strategi UIN dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Mendorong dan memfasilitasi penelitian yang bersifat interdisiplin

Strateginya adalah:

- a. Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen
- b. Pengayaan teori-teori dan wacana keilmuan yang aktual
- c. Pelatihan metode penelitian bagi mahasiswa
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa S1
- e. Peningkatan kualitas penelitian mahasiswa S2, S3

2. Memfasilitasi dan memberikan penghargaan terhadap publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen. Strateginya adalah:

- a. Peningkatan jumlah Publikasi ilmiah dosen
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal yang diterbitkan UIN Antasari
- c. Peningkatan diseminasi karya ilmiah
- d. Reward bagi peneliti produktif yang mengangkat citra dan reputasi Lembaga

3. Mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen, antar sesama dosen lintas keilmuan, dan/atau Lembaga akademik.

Strateginya adalah:

- a. Pelaksanaan penelitian kolaboratif antar dosen, antar mahasiswa, dan antar Lembaga
- b. Pemanfaatan hasil penelitian dalam bidang pengajaran
- c. Peningkatan payung penelitian bagi Guru Besar

4. Mendorong dan memfasilitasi penelitian-penelitian inovatif yang bermanfaat bagi kehidupan aktual masyarakat

Strateginya adalah:

- a. Pengembangan penelitian berbasis problem sosial dan keagamaan masyarakat Banjar
- b. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga/industri terkait

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis integrasi ilmu dan kearifan lokal

Strateginya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis integritas ilmu dan kearifan lokal

2. Mendorong dan memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan Internasional yang berorientasi pada peningkatan wawasan keagamaan, kemandirian, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Strateginya adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
- b. Peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Peningkatan Kerjasama pengabdian masyarakat dengan Lembaga lain

3. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman di masyarakat melalui berbagai media, terutama media digital.

Strateginya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Mendorong dan memfasilitasi Pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset Strateginya adalah:
 - a. Pelaksanaan program Bahtsu Masaail Ummah
 - b. Peningkatan Participatory Action Research (PAR) di kalangan dosen

3.2 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan (peraturan dan perundang-undangan) sebagai landasan hukumnya. Regulasi di Kementerian Agama harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) member aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat untuk memperoleh layanan Pendidikan Islam, (c) mendorong potensi kreativitas komunitas Pendidikan Islam lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya sasaran.

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak-sinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah : (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, Ditjen Pendidikan Islam berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan arahan Renstra Kementerian Agama, regulasi yang perlu disiapkan oleh Direktorat Jenderal mencakup draf Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang memberikan dasar kebijakan dan peraturan tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan. Peran Direktorat Jenderal dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri adalah

memberikan kontribusi terhadap konten yang berhubungan atau yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu, juga ada Surat Keputusan bersama lintas Kementerian/Lembaga dan Surat Keputusan bersama di tingkat Direktorat Jenderal, baik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktorat Jenderal maupun Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sebagian regulasi bersifat baru, dan sebagian berupa revisi, penyempurnaan, atau konsolidasi dari regulasi yang sudah ada.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah

Dalam konteks Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perubahan kelembagaan dilakukan dengan memper- timbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Pendidikan Islam 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan yang sesuai dengan UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1 Dibentuknya Majelis Pengembangan Ilmu Agama Islam sebagai kelompok kerja tetap, untuk mengarahkan dan menjaga kebijakan dan kualitas implementasi pengembangan program akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan sekaligus menindaklanjuti amanah Pasal 8 butir d PP no. 46/2019
- 2 Dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri untuk akselerasi akreditasi program studi dalam rangka meningkatkan kualitas PTKI
- 3 Perubahan kelembagaan PTKIN menjadi PTKIN-BH atau PTKIN-BLU
- 4 Dibentuknya kampus jauh dan diselenggarakannya sistem pembelajaran dalam jaringan pada PTKI

3.4 Kerangka Pengendalian

Pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan strategik yang baik, oleh karena itu kegiatan ini dimandatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pengendalian Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2020-2024 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh internal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag dan Kementerian lain/lembaga di luar Kemenag.

Kerangka pengendalian internal mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, tindak lanjut hasil pengendalian. Pengendalian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan program/kegiatan dan anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam setiap tahap akan mengandung tiga kerangka pengendalian tersebut. Dalam tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian dilakukan dengan cara: (a) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbasis Renstra, (b) menyusun template RKA-KL untuk satuan kerja yang sejenis, (c) memberikan pelatihan/pendampingan penyusunan dokumen RKA-KL berbasis Renstra dan RKP bagi staf satuan kerja, (d) menyusun rubrik evaluasi RKA-KL, dan (e) meneliti usulan RKA-KL, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan rubrik. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, rubrik evaluasi RKA-KL, dan template penyusunan RKA-KL satuan kerja. Tindak lanjut dari hasil koreksi serta saran perbaikannya dipergunakan untuk memfinalkan RKA-KL hasil perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya; yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga dilakukan setahun dua kali di tingkat daerah dan Pusat melalui Rapat Koordinasi Monev Program. Hasil analisis Monev Program tingkat nasional menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, Monev Program Pendidikan Islam juga dilakukan melalui "*Program Mid-term Review*" pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dilakukan pada tahun ketiga periode Renstra dan "*Program Final Review*" yang dilaksanakan pada akhir tahun periode Renstra. "*Program Mid-term Review*" akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran antara dari Program Pendidikan Islam,

identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi. "*Program Final Review*" akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam periode selanjutnya.

Pengendalian pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga dilakukan oleh pihak lain, yaitu Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari PHLN. Tujuan, tahapan, sasaran, instrumen dan tindak lanjutnya ditentukan oleh tugas dan fungsi serta kepentingan masing-masing lembaga yang bersangkutan.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kode	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target ideal	Baseline	Tahun Pencapaian					Ket.	PJ
					2020	2021	2022	2023	2024		
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat										
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai		44.40	44.40	61.39	62.51	63.71	64.91		Fak/ Pasca
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa yang di bina dalam moderasi beragama	%		NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00		Rumah moderasi
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen yang di bina dalam moderasi beragama	%		NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00		Rumah moderasi
SP 5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan										
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%		56.60	58.86	66.00	69.60	73.20	75.60		LPM
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%		17.99	21.40	27.00	31.40	36.00	40.00		Biro AUPKK
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00		Fak/Pasca
SP. 4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan										
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly	%		18.82	19.32	20.84	21.06	22.38	22.50		Biro AAKK (Mikwa)
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%		4.70	5.00	8.00	10.00	13.00	17.00		Biro AAKK/ Mikwa

IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima Beasiswa	Orang		300	300	600	900	900	1200		Biro AAKK/ Mikwa
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%		0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		Fak/Pasca
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan										
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%		20.76	21.00	23.60	28.00	32.40	36.80		Fak/ Pasca/ LPM
IKSP.3.5.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%		38.60	44.00	49.00	52.40	57.40	63.00		Fak/ Pasca/ LPM
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%		NA	7.00	10.00	12.00	15.00	20.00		Fak/Pasca
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Program studi yang menyelenggarakan sistem kampus merdeka	%		NA	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00		LPM
IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%		50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00		Fak/Pasca
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada PTKIN terhadap seluruh sumber daya pendidikan.	%		4.10	5.10	6.00	7.00	9.00	10.00		Biro AUPKK
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%		0.01	NA	15.00	17.00	20.00	23.00		Biro AUPKK
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional										
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%		9.03	9.1	9.15	11.75	13.88	16.4		WR 1
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%		0.38	0.45	0.56	0.63	0.79	0.95		WR 3
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%		3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	10.00		Fak/ Pasca
IKSK.5.2132.11.1	Persentase program studi PTKI yang memenuhi standar Akreditasi Internasional	%		1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		LPM
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%		1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	4.50		WR 3/ WD 3
IKSK.5.2132.3	Persentase kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%		1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		WR 3/ WD 3
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerja sama internasional yang di tindak lanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%		2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00		WR 3/ WD 3
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerja sama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%		2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00		WR 3/ WD 3
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	%		0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30		Fak/ Pasca

IKSS11.3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	%		2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00		Fak/ Pasca/ LP2M
IKSS11.4	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%		0.14	2.77	5.4	8.03	10.66	13.29		Fak/ Pasca/ LP2M
SP. 5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja										
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%		37.50	39.25	42.5	53.67	56.67	61.33		UPKK
IKSP.5.6.2	a. S1			NA	2.65	2.65	2.7	2.75	2.75		
IKSP.5.6.2	b. S2			NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25		
IKSP.5.6.2	c. S3										
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan		11	9	8	7	6	5		WD3/ UPKK
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%		27.28	32.32	37.36	42.40	47.44	53.36		UPKK
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	%		0.02	0.03	0.04	0.05	0.1	0.15		Pasca
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu	%		78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00		Biro AAKK/ Mikwa
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI	Tahun		4	4	4	4	4	4		Biro AAKK/ Mikwa
	a. Rerata masa studi S1										Mikwa/Fak/Pasca
	b. Rerata masa studi S2										Mikwa/Fak/Pasca
	c. Rerata masa studi S3										Mikwa/Fak/Pasca
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian										
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%		10.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00		LP2M
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	%		30.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00		LP2M
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan hak paten	%		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00		LP2M
SP. 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel										
IKSP.16.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%		74.83	78	82.27	85.55	88.36	91.27		Biro AUPKK

IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai		87.48	88.31	90.16	90.82	91.49	92.14		Biro AUPKK
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		81.52	82.63	85.98	87.86	90.21	92.53		Biro AUPKK
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai		3.05	3.12	4.07	4.28	4.57	4.72		Biro AUPKK / SPI
IKSP.5.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%		70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	82.00		Biro AUPKK / SPI
IKSK.5.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%		14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00		Biro AUPKK/ LPM
IKSK.5.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasi/ diterbitkan	%		50.00	52.00	60.00	70.00	80.00	90.00		Biro AUPKK / SPI
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%		75.00	80.00	83.00	84.00	87.00	88.00		Biro AUPKK
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai barang milik negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%		75	85	90	95	97	98		Biro AUPKK
IKSK.1.2135.5.1	Indeks Profesionalitas ASN	%		NA	75	79	82	85	87		Biro AUPKK

Tujuan 1 : Penguatan moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat							
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	44.40	44.40	61.39	62.51	63.71	64.91
SK.5.2132.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama							
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00

Tujuan 2: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan							
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	%	18.82	19.32	20.84	21.06	22.38	22.50
SK.4.XXXX.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik							
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	56.60	58.86	66.00	69.60	73.20	75.60
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17.99	21.40	27.00	31.40	36.00	40.00
SK.5.2132.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif							
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	NA	7.00	10.00	12.00	15.00	20.00
SK.5.2132.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
SK.5.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
SK.5.2132.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat							
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%	4.70	5.00	8.00	10.00	13.00	17.00
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima beasiswa	Orang	300	300	600	900	900	1,200
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	%	0.02	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15
SK.5.2132.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi							
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%	NA	NA	50	70	80	100
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	NA	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00
SK.5.2132.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu	%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen PTKI yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	10.00
SK.5.2132.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan							
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH	Lemb.	18	19	22	27	31	35
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	4.10	5.10	6.00	7.00	9.00	10.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%	0.01	NA	15.00	17.00	20.00	23.00
SK.5.2132.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional							
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	4.50
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	2.00	3.00	5.00	9.00	10.00	15.00
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
SK.5.2132.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK							
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian PTKI yang memperoleh HAKI	%	30.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian PTKI yang menghasilkan Hak Paten	%	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
SK.5.2132.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK							
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu	%	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI	Tahun	4	4	4	4	4	4
SK.5.XXXX.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
IKSK.5.XXXX.2.1	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3.00	4.00	5.00	7.00	10.00	12.00
IKSK.5.XXXX.2.2	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
SK.5.XXXX.3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
KSK.5.XXXX.3.1	Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	40.00
SK.5.XXXX.4	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
KSK.5.XXXX.4.1	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu	%	10.00	15.00	17.00	20.00	24.00	28.00
KSK.5.XXXX.4.2	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00

Tujuan 3 : Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas							
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	%	0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	27.28	32.32	37.36	42.40	47.44	53.36
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%	2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%	0.14	2.77	5.40	8.03	10.66	13.29
IKSP.3.7.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	%	30.00	35.00	37.00	40.00	45.00	50.00
SK.3.XXXX.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
IKSK.3.XXXX.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	50.00	70.00	80.00	80.00	90.00
IKSK.3.XXXX.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3.00	4.00	4.50	4.70	4.90	5.00
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan							
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%	20.76	21.00	23.60	28.00	32.40	36.80
IKSP.5.3.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%	49.40	55.00	59.00	67.00	72.00	77.00

SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional							
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%	9.03	9.10	9.15	11.75	13.88	16.4
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%	0.38	0.45	0.56	0.63	0.79	0.95
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian							
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%	10.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja							
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%	37.50	39.25	42.50	53.67	56.67	61.33
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK							
	a. S1	Nilai	NA	2.65	2.65	2.70	2.75	2.75
	b. S2	Nilai	NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25
IKSP.5.6.3	Reratamasatunggululusansebelummemperolehpekerjaan	Bulan	11	9	8	7	6	5

Tujuan 4 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel							
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel							
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	74.83	78.00	82.27	85.55	88.36	91.27
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87.48	88.31	90.16	90.82	91.49	92.14

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81.52	82.63	85.98	87.86	90.21	92.53
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.05	3.12	4.07	4.28	4.57	4.72
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	70.60	73.27	75.73	77.27	79.64
SK.1.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal							
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	82.00
SK.1.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi							
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	50.00	52.00	60.00	70.00	80.00	90.00
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja							
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	75.00	80.00	83.00	84.00	87.00	88.00
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	75.00	85.00	90.00	95.00	97.00	98.00
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern							
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	95.00
SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional							
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	75.00	79.00	82.00	85.00	87.00
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	84.00	85.00	87.00	89.00	93.00	95.00

4.2 Kerangka Pendanaan

4.2.1 Kerangka Pendanaan Dirjen Pendis

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh Pemerintah dan sebagian besar oleh masyarakat, dengan sumber pendanaan berasal dari kedua belah pihak tersebut. Kerangka pendanaan dalam bab ini disusun khusus untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kerangka pendanaan dalam Renstra Pendidikan Islam berupa rambu-rambu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mengelola investasi pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai Pendidikan Islam. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan Pendidikan Islam mencakup: (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; (b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c) ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara di Pusat dan daerah; menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya; (e) mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia; (f) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (*ownership*), seperti sistem pendanaan bersama (*join financing*), pendanaan berbasis kinerja (*output-based financing*), pendanaan berbasis kontrak prestasi (*performance-based transfer*), pendanaan dengan dana pendamping (*matching-grant financing*); dan (g) meningkatkan pemerataan dan rasa keadilan

4.2.2 Kerangka Pendanaan UIN Antasari

Kerangka pendanaan dalam Renstra UIN Antasari tentu mengikuti alur kerja dalam sebuah institusi atau organisasi seperti perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan. Mekanisme ini harus dilakukan agar implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra bisa tercapai. Tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja khususnya pada UIN Antasari dalam mengelola uang negara, sehingga partisipasi civitas akademika dan masyarakat agar terlibat dalam proses ini secara nyata dan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya.

Kaidah dalam pengelolaan pendanaan dan anggaran di UIN Antasari adalah:

1. Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dalam bentuk membagi persentase anggaran agar dapat terpetakan setiap tahun anggaran.
2. Memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia baik RM, PNBPN, SBSN, RMP dan PHLN.
3. Ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara lembaga dan unit kerja seperti,

Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat (LP2M), Unit Pengelola Teknis (UPT) dan Bagian dalam lingkup Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian (AUPKK) dan Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK).

4. Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya.
5. Mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia dan meningkatkan pemerataan dan rasa keadilan.
6. Mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (ownership)

Sumber pendanaan UIN Antasari berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Hibah Dalam Negeri (HDN) dari Pemerintah daerah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan pendanaan dari masyarakat bersumber pada Filantropi yaitu zakat, infaq dan sedekah.

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup: 1) Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada UIN Antasari, dan 3) Belanja Non Operasional/ Belanja Sosial seperti, KIP Kuliah dan Bidik Misi serta bantuan sarana prasarana sebagai upaya untuk melakukan pengembangan kelembagaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
2. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam bentuk:
 - a. Belanja operasional perkantoran seperti gaji Pegawai Non PNS, tunjangan sertifikasi dosen Tetap Bukan PNS, honor dan tunjangan lain sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran di UIN Antasari sebagai pembiayaan tambahan dari anggaran RM yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan.
 - c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, kegiatan penunjang pengembangan kelembagaan, serta peningkatan akreditasi dan mutu UIN Antasari, dan
 - d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, jalan dan drainase, jaringan internet, peralatan dan mesin, aset tidak berwujud, dan aset lainnya.
3. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dalam bentuk pembangunan ruang kuliah, Laboratorium Keagamaan, gedung layanan terpadu dan pembangunan Gedung

Perkuliahan, Laboratorium Terpadu, Perpustakaan, aula pertemuan di kampus 2 (dua) Banjarbaru.

4. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari PEMDA/ Bangub) lebih difokuskan untuk melakukan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan, pendidikan pengajaran, pengembangan lembaga, dan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Adapun deskripsi kerangka pendanaan UIN Antasari sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain;

a. Pendidikan dan Pengajaran

Mendukung pendanaan terkait pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan utama membiayai honorarium tenaga pendidik eksternal dan internal (dosen tetap atau dengan perjanjian kerja), vakasi, serta program penunjang pendidikan dan pengajaran yang sangat varian sesuai kebutuhan Fakultas dan Pascasarjana. Pembiayaan ini merupakan kategori belanja rutin dan mutlak harus teralokasikan sepanjang tahun (selama proses perkuliahan berjalan).

Sebagai bentuk belanja rutin, maka pembiayaan ini harus “bergaransi”, anggaran harus siap teralokasi pada DIPA dalam kondisi apapun (meski terjadi program penghematan anggaran dalam tahun berjalan, refocusing anggaran dalam masa pandemic dan lain sebagainya).

Tantangan lainnya yang tidak kalah serius dalam perencanaan dan realisasi anggaran yakni terjadinya pemblokiran anggaran. Bukan hal mustahil bagi UIN Antasari untuk dapat bebas terhindar dari pemblokiran anggaran pada belanja rutin terkait pendidikan dan pengajaran.

Langkah pencegahan sebagai solusi yakni mengalokasikan sumber anggaran belanja rutin terkait unsur pendidikan dan pengajaran dari PNBP. Hal ini atas pertimbangan trend beberapa tahun anggaran sebelumnya bahwa pemblokiran dan penghematan anggaran terjadi pada sumber anggaran Rupiah Murni (RM).

b. Penelitian

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pemerintah minimal harus mengalokasikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian. Melalui payung hukum ini maka pengalokasian anggaran penelitian bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri menjadi concern dalam kerangka program prioritas nasional untuk memajukan mutu Perguruan Tinggi Negeri melalui penelitian.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Pengabdian Pada Masyarakat turut menjadi perhatian serius bagi UIN Antasari. Berbagai bentuk program kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam frame program pengabdian pada masyarakat, antara lain ; Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Desa Binaan, Safari pengabdian dosen, dan satu diantaranya menjadi program unggulan

UIN Antasari yaitu Bahsul Masa'il Ummat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah di Kalimantan Selatan .

Berbagai varian program Pengabdian Pada Masyarakat ini tentunya turut disupport melalui realokasi anggaran baik bersumber dari PNBPN dan RM (BOPTN). Dalam implementasi perencanaan dan penganggaran program ini seringkali menjadi "target" penghematan nasional. Sehingga program ini dalam beberapa tahun anggaran sering terjadi realokasi dan revisi anggaran secara signifikan.

Menjadi "target" penghematan anggaran secara nasional karena sebagian besar anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari RM karena amanat program penghematan pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya membatasi penghematan BOPTN/ RM. Sebagai refleksi, kondisi ini tentunya akan sedikit memberikan efek negatif dalam pelaksanaan program. Mengingat pentingnya program ini yang tidak hanya melibatkan dosen namun juga tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Langkah pencegahan kelak yang perlu dilakukan dalam mempertahankan program Pengabdian pada masyarakat ini, UIN Antasari melalui LP2M harus mampu "membedik" program berbasis masyarakat yang nyata dibutuhkan pada suatu wilayah pemerintah daerah. Dengan demikian, UIN Antasari secara keilmuan dapat berkontribusi pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan "inisiator" program. Demikian juga, cost sharing program dapat diatasi oleh LP2M dengan tidak sekedar mengandalkan satu sumber anggaran.

Pemerataan dan rasa keadilan dalam pendanaan juga diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya pedoman standar biaya yang dibuat oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan mengacu kepada ketentuan Kementerian Keuangan dan keperluan serta kondisi nyata di UIN Antasari.

BAB V

PENUTUP

Secara keseluruhan, Rencana Strategis ini adalah niat yang dipasang dengan sungguh-sungguh, dengan rincian kegiatan yang tersusun secara koheren, yang diharapkan dapat menjadi kenyataan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam teori manajemen, perencanaan merupakan tonggak atau titik awal yang penting bagi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Namun, perencanaan bisa pula dilihat lebih strategis dari itu, karena ia menduduki posisi niat untuk setiap perbuatan. Jika Nabi mengatakan, nilai setiap perbuatan terletak pada niat, maka Rencana Strategis ini juga demikian kedudukannya bagi para pelaku yang menyusun dan/atau mereka yang kelak melaksanakannya. Semoga Allah memudahkan kita dalam mewujudkan niat yang baik ini. Amin.